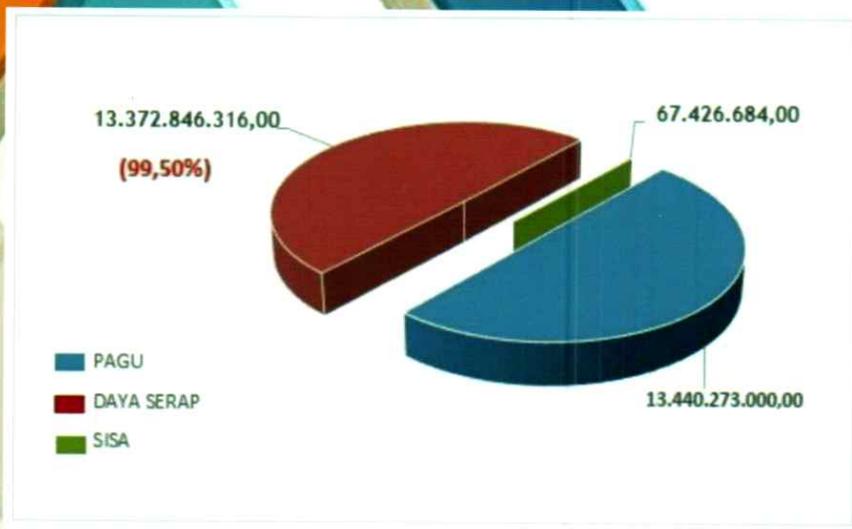




LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT III

T.A. 2021

(PER 31 DESEMBER 2021)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Inspektorat III dapat menyelesaikan laporan kinerja (LAKIN) tahun anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari Permendikbud Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan PermenPan-RB No.53 Tahun 2014, bahwa Laporan Kinerja (Lakin) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan ini memuat capaian kinerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dalam kurun waktu 1 (satu) tahun t.m.t Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Di dalam laporan ini disajikan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dari masing-masing program yang telah ditetapkan, serta disajikan analisis akuntabilitas kinerja dalam upaya mendukung peningkatan mutu pengawasan pendidikan pada Sekretariat Jenderal Kemdikbudristek, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa baik pada level kebijakan maupun operasional. Selain itu mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala/hambatan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Harapan kami laporan ini dapat memberikan gambaran obyektif tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, serta memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait khususnya internal Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, sekaligus menjadi sumber informasi yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Jakarta, Januari 2022

Inspektur III,



Drs. Bernard Purba, M.Ak

NIP 196305221988021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Sumber Daya Manusia	4
F. Isu-isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Kinerja Tahunan	11
B. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Inspektorat III I.....	17
B. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kesatu.....	18
C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua.....	20
D. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga.....	23
E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat.....	27
F. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelima.....	22
G. Dukungan Operasional Pengawasan Internal.....	28
H. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	30
A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat III Itjen Kemdikbud....	30
B. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi.....	30
C. Upaya Pemecahan Masalah	31

LAMPIRAN :

1. Surat Pernyataan Telah Direviu
2. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II (terbaru)
3. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II (awal)
4. Rencana Kerja Tahunan tahun 2021
5. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Inspektorat III Tahun 2020

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Jabatan dan Jenjang	4
Tabel 2.1	Target Capaian Inspektorat III dalam Renstra 2021 - 2024	10
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021	12
Tabel 2.3	Target kinerja dalam perjanjian kinerja (awal) Inspektorat III tahun 2021	14
Tabel 2.4	Target kinerja dalam perjanjian kinerja (revisi) Inspektorat III tahun 2021	15
Tabel 2.5	Perbandingan Anggaran per output kegiatan di Inspektorat III tahun 2020 dan 2021	16
Tabel 3.1	Perbandingan Pengukuran Kinerja Inspektorat III Itjen antara 2020 dan 2021	17
Tabel 3.2	Perbandingan Pengukuran IKK 1 antara 2020 dan 2021	18
Tabel 3.3	Perbandingan Pengukuran IKK 2 antara 2020 dengan 2021 ...	20
Tabel 3.4	Perbandingan Pengukuran IKK 3 antara 2020 dan 2021	23
Tabel 3.5	Perbandingan Pengukuran IKK 4 antara TA 2020 dan 2021 ...	28
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Anggaran 2020 dan 2021	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Jabatan dan Jenjang	4
Grafik 1.2	Jenjang Pendidikan	5
Grafik 2.1	Perbandingan Pagu Anggaran TA 2020 dan 2021	16
Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK 1 tahun 2020 dan 2021 ...	19
Grafik 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK 2 tahun 2020 dan 2021 ...	21
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK 3 tahun 2020 dan 2021 ...	24
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK 4 tahun 2020 dan 2021	28
Grafik 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja IKK 5 tahun 2020 da 2021	44
Grafik 3.6	Realisasi Anggaran TA 2021	48
Grafik 3.7	Perbandingan Realisasi Anggaran 2020 dan 2021	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Inspektorat III	4
Gambar 3.1	Audit Kinerja (PPG) pada Universitas PGRI Madiun.....	19
Gambar 3.2	Prasarana PPG di Universitas PGRI Madiun.....	20
Gambar 3.3	Audit Kinerja (TPG PNSD) di Kab. Wonogiri, Jateng.....	22
Gambar 3.4	Audit Kinerja (SIPLah) di Kab. Jember, Jawa Timur	22
Gambar 3.5	Pendampingan ZI WBK di BPMPK Semarang (Maret 2021)	26
Gambar 3.6	Pendampingan ZI WBK di BPMPK Semarang (Maret 2021)	26
Gambar 3.7	Pendampingan ZI WBK di Biro Umum Setjen (Juni 2021)	27
Gambar 3.8	Penyusunan Pedoman LAKIP (zoom meeting)	29
Gambar 3.9	Sosialisasi Audit PNBK (zoom meeting).....	30
Gambar 3.10	PKS tentang ZI WBK (zoom meeting)	31
Gambar 3.11	Audit kinerja (TPG Non PNS) di Kab. Bandung Barat, Jawa Barat (April 2021)	31
Gambar 3.12	Audit kinerja (Pembelajaran Berbasis TIK) pada Balai Tekkom Yogyakarta (Mei 2021)	32
Gambar 3.13	Audit kinerja (TPG Was Sekolah) di Kab. Indramayu, Jawa Barat (April 2021)	32
Gambar 3.14	Evaluasi Manajemen Risiko pada P4TK IPA Bandung	34
Gambar 3.15	Evaluasi Manajemen Risiko pada P4TK IPA Bandung	34
Gambar 3.16	Pemantauan Program Banpem Biro Keuangan di Kab. Bandung, Jawa Barat	35
Gambar 3.17	Pemantauan Program Banpem Biro Keuangan di Kab. Batang, Jawa Tengah	35
Gambar 3.18	Pemantauan Program Banpem Biro Keuangan di Kab. Lombok Timur, NTB	36
Gambar 3.19	Pemantauan Program KIP Kuliah di STIE AMA, Salatiga, Jawa Tengah	36
Gambar 3.20	Pemantauan Program KIP Kuliah di STIKES Telogorejo, Semarang, Jawa Tengah	

Gambar 3.21	Pemantauan rehab pagar samping Balai Bahasa Sulteng (cek fisik)	37
Gambar 3.22	Pemantauan rehab pagar samping Balai Bahasa Sulteng (cek dokumen)	37
Gambar 3.23	Pendampingan LK di LL Dikti Wilayah XI Banjarmasin (Desember 2021)	38
Gambar 3.24	Pendampingan Penyusunan LAKIP di LL Dikti Wilayah XI Banjarmasin (Desember 2021)	38
Gambar 3.25	Pendampingan SPI pada LP2KS Solo	39
Gambar 3.26	Pendampingan SPI pada LP2KS Solo	39
Gambar 3.27	Inspektur III memberikan pengarahan pada kegiatan evaluasi program di Bandung (Desember 2021)	39
Gambar 3.28	Inspektur Jenderal Kemendikbudristek memberikan pengarahan via zoom	39
Gambar 3.29	Para auditor mengikuti kegiatan evaluasi program	40
Gambar 3.30	Para auditor mengikuti kegiatan evaluasi program	40
Gambar 3.31	Para auditor mengikuti kegiatan evaluasi program	40
Gambar 3.32	Kegiatan Ketatausahaan di Hotel Mercure Alam Sutra, Serpong, Banten	42
Gambar 3.33	Kegiatan Ketatausahaan di Hotel Santika Premierre, Bintaro, Tangsel, Banten	42
Gambar 3.34	Kegiatan Ketatausahaan (di Hotel Luxton, Bandung) dan Hotel Santika Premierre, Bintaro, Tangsel, Banten	43
Gambar 3.35	Reviu LK Kementerian Semester I (secara zoom)	45
Gambar 3.36	Kegiatan TEPR di Hotel Mirah, Bogor (Sept 2021)	47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Pasal 226 menyatakan bahwa Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan Pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya.

1. Capaian Kinerja Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2021 yang telah ditetapkan, Inspektorat III Itjen Kemendikbud memiliki 5 (enam) indikator kinerja yang akan dicapai. Berikut merupakan tabel pengukuran kinerja Inspektorat III Itjen Kemendikbud Tahun Anggaran 2021

Capaian Kinerja Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek antara 2020 dan 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2020	2021	2020	2021
1	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat III	%	20	35	20	35.29
2	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Inspektorat III	%	20	35	42.88	8.17
3	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III	%	70	75	52.94	10

4	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	skor	3.1	3.2	dilaksanakan Januari 2021	3.42
5	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	%	100	100	dilaksanakan Januari 2021	100

1.1. Capaian Kinerja (IKK.1)



Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat III tercapai sebesar 35,29 % atau 100 % dari target sebesar 35%. Dengan berhasilnya Inspektorat III telah melakukan pengawasan pada 12 (dua belas) provinsi.

1.2. Capaian Kinerja (IKK.2)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		2020	2021	2020	2021
Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Inspektorat III	%	20	35	42.88	8.17

Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat III sebesar 8,17% atau sebesar 23,35 % dari target 35%. Hal ini tidak memenuhi target yakni 35%.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan capaian persentase tersebut karena pada Triwulan I, II, dan III masih dalam masa pandemi Covid-19 dan seiring terjadi peningkatan level PPKM pada Kab/Kota yang menjadi sasaran tidak dapat dilaksanakan, sehingga target tidak tercapai.

Adapun solusi atas terjadinya kendala tersebut, pada Kab/Kota yang telah tercantum dalam surat tugas, surat tugas direvisi dan petugas/auditor yang bersangkutan dialihkan ke Kab/Kota lain yang sudah ada dalam surat tugas.

1.3. Capaian Kinerja (IKK.3)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		2020	2021	2020	2021
Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III	%	70	75	52.94	10

Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III, berhasil dicapai 10% atau 13,13 % dari pengajuan 10 satuan kerja,

dimana pada tahun 2021 satuan kerja yang berhasil mendapat predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi adalah Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kemendikbudristek.

1.4. Capaian Kinerja (IKK.4)

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		2020	2021	2020	2021
Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	skor	3.1	3.2	dilaksanakan Januari 2021	3.42

Mengevaluasi Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III, berhasil dicapai skor 3,42 dari target 3,2. Dari hasil penilaian SPIP terhadap tiga Unit Utama yaitu :

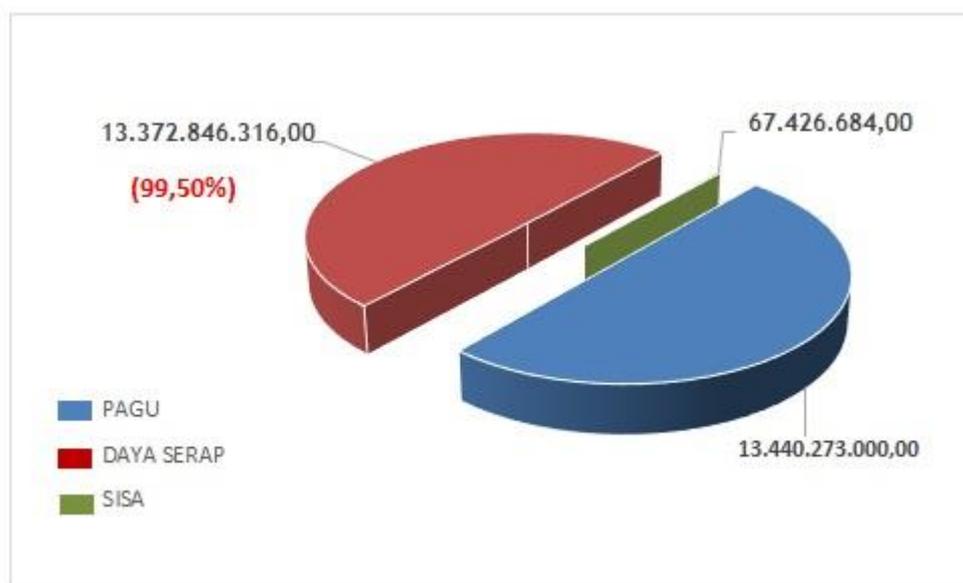
- Setjen Kemendikbudristek, mendapat skor 3,28
- Ditjen GTK, mendapat skor 3,28
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mendapat skor 3,8

1.5. Capaian Kinerja (IKK.5)

Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III, diperoleh 100 %, dimana hasil evaluasi terhadap tiga Unit Utama didapatkan hasil sebagai berikut :

- Setjen Kemendikbudristek, mendapat skor 4,94 (sangat baik)
- Ditjen GTK, mendapat nilai 4,84 (sangat baik)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mendapat nilai 4,91 (sangat baik).

2. Realisasi dan Optimalisasi Anggaran

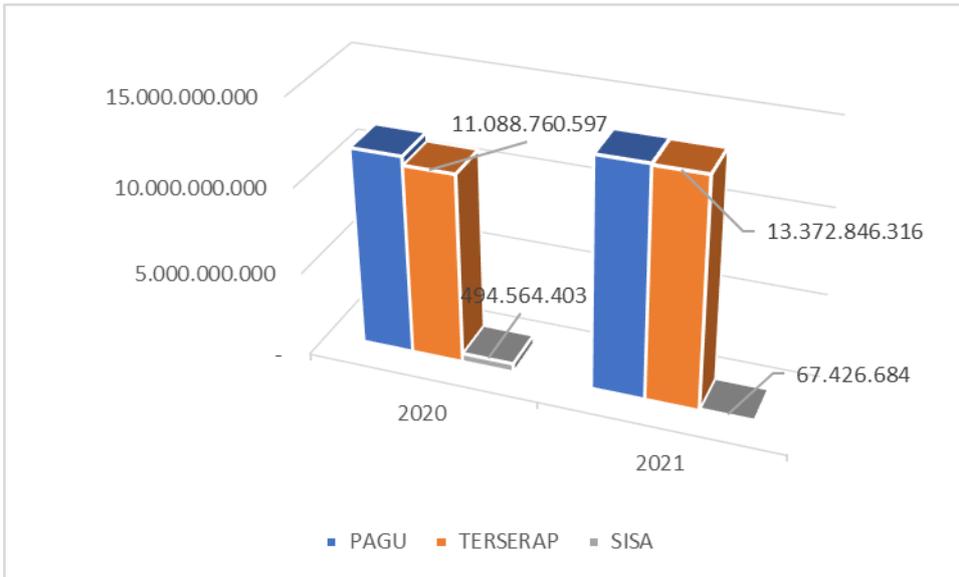


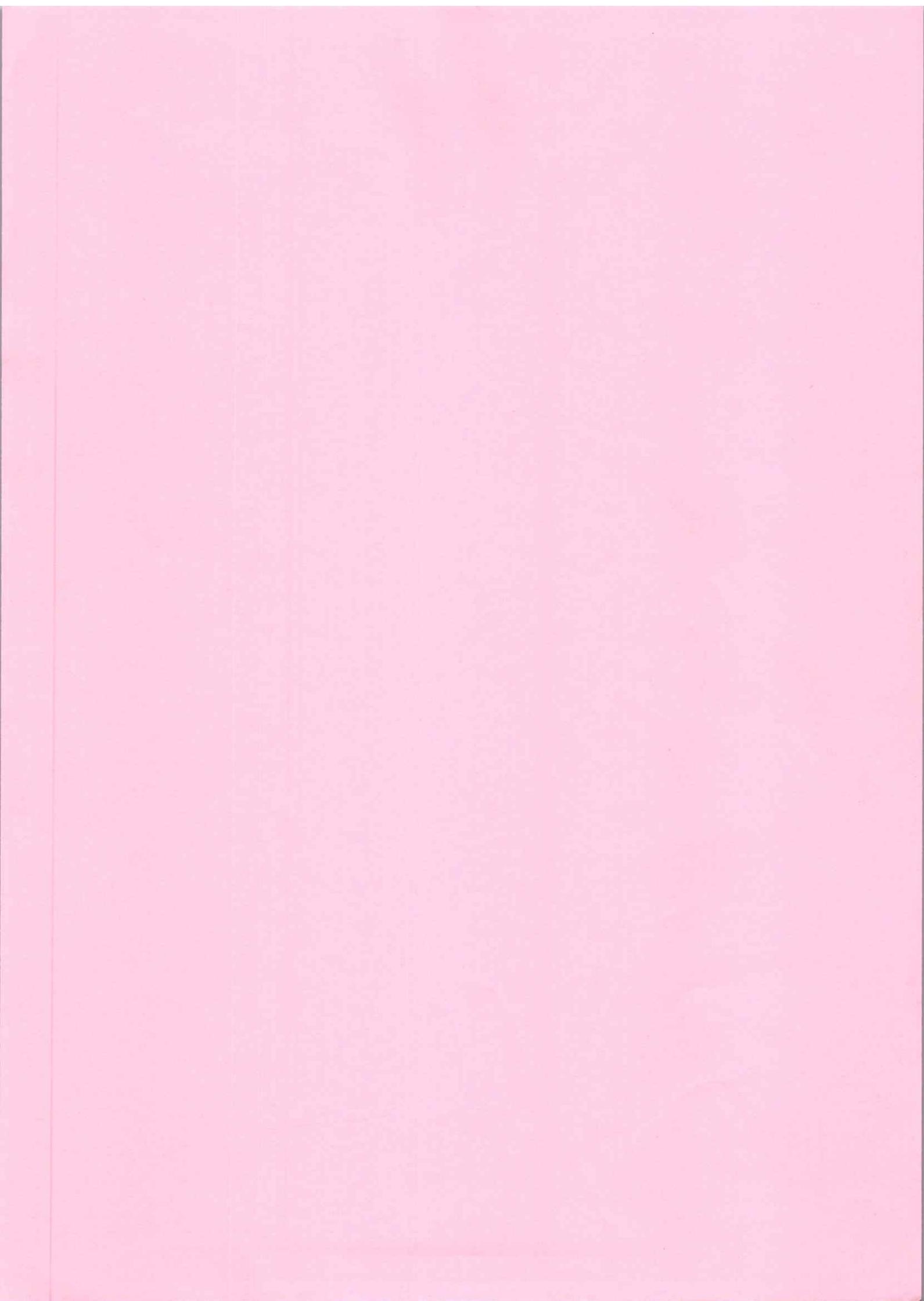
Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2021 Inspektorat III Itjen Kemendikbud memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp19.114.355.000,- (DIPA awal), dimana dalam perjalannya terjadi beberapa kali revisi anggaran (*refocusing*) sehingga yang terakhir sebesar Rp13.440.273.000,- dan diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 secara kumulatif telah terserap anggaran sebesar Rp13.372.846.316,- atau sebesar 99,50% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 67.426.684,- (0,5%).

Adapun efisiensi dari beberapa sisa anggaran dioptimalisasikan untuk menambah pelaksanaan kegiatan audit yakni audit PNBP pada bulan Nopember 2021.

Perbandingan anggaran tahun 2020 dengan anggaran 2021

TA	PAGU	TERSERAP	SISA
2020	11.583.325.000	11.088.760.597	494.564.403
2021	13.440.273.000	13.372.846.316	67.426.684





BAB I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bab IX Pasal 216 Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian, sedangkan Pasal 217 Inspektorat Jenderal Kementerian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. pelaksanaan pengawasan teknis bidang Pendidikan dan kebudayaan di daerah;
5. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
6. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada Pasal 226 menyatakan bahwa Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan Pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya.

Pada pasal 227 menyatakan bahwa dari Inspektorat I sampai dengan IV menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
2. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat;
3. pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara.
4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
5. pelaksanaan pencegahan korupsi
6. pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya
7. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat III Itjen Kemendikbud membina satuan kerja eselon II yaitu : Sekretariat Jenderal, Ditjen Guru Tenaga Kependidikan dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Unit Pelaksana Teknisnya (UPT).

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

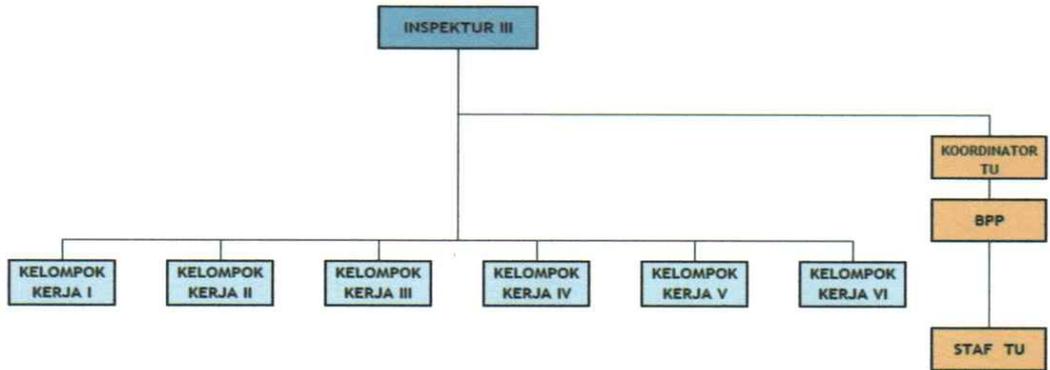
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendikbud Nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi tata kerja kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
7. Permendikbud No.39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tanggal 20 Agustus 2020.

C. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud dalam Pasal 217 Inspektorat Jenderal fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. pelaksanaan pengawasan teknis bidang Pendidikan dan kebudayaan di daerah;
5. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
6. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat III Itjen Kemendikbud

E. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek terdiri dari : 1 orang Inspektur, 65 orang auditor, 1 orang Sub Koordinator TU, dan 7 orang Staf Tata Usaha.

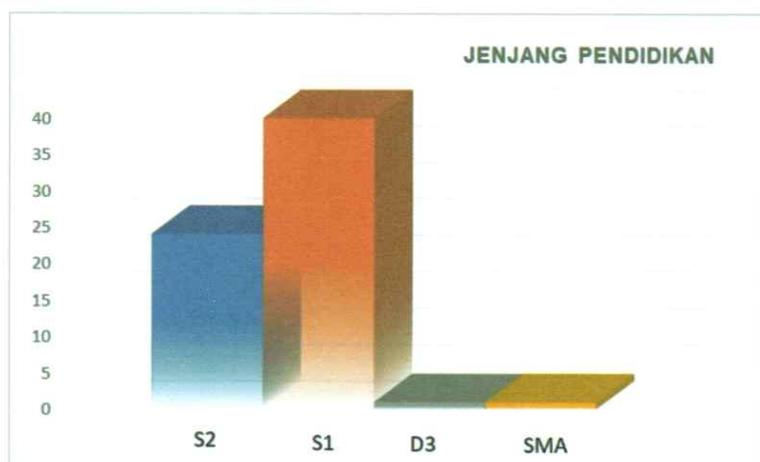
Tabel 1.1 Jumlah Jabatan dan Jenjang

Auditor Utama	Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Pertama	Auditor Kepeg. Pertama	Auditor Penyelia	Auditor Pelaksana
4	19	19	18	3	1	1

Grafik 1.1 Jumlah dan Jenjang Jabatan



Grafik 1.2 Jenjang Pendidikan



F. Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat III terkait dalam pembinaan terhadap satuan kerja yang menjadi binaannya dalam tahun 2021, antara lain:

1. Program Guru Penggerak (PGP), permasalahan yang ditemukan, antara lain: laporan PGP belum dikirim ke Ditjen GTK; jadwal pendampingan individu tidak efisien, dan lokakarya sebaiknya secara luring/ tatap muka.
2. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), antara lain : terjadi pungutan biaya lain-lain kepada mahasiswa penerima KIP Kuliah On Going 2020, penerima KIP kategori usulan dari masyarakat kurang tepat sasaran, dan penetapan kuota KIP Kuliah oleh PUSLAPDIK diinformasikan setelah selesai proses penerimaan mahasiswa baru, sehingga mahasiswa calon penerima KIP Kuliah banyak yang gagal menerima, sehingga mengakibatkan banyak yang tidak dapat melanjutkan kuliah.

3. Program Bantuan Pemerintah Biro Keuangan, antara lain : Belum dilakukan penyesuaian dan pengesahan RAB terkait perubahan atas realisasi dana bantuan yang diterima sebagaimana tercantum dalam proposal, penerima Banpem Biro Keuangan dan BMN tidak menyampaikan tembusan surat permohonan dan proposal kepada dinas Pendidikan, sehingga tidak diketahui/dipantau adanya Banpem.
4. Program Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah), perencanaan lanjutan pelaksanaan Program SIPLah berupa pengalihan pengelolaan dari Biro Umum dan PBJ ke Pusdatin Kemendikbudristek belum didukung oleh regulasi yang memadai, nilai pembayaran yang dibayar oleh Satuan Pendidikan masih kurang/tidak sesuai dengan nilai tagihan dalam sistem,
5. Program Indonesia Pintar (PIP), hal-hal yang terjadi antara lain: tidak sinkron data PIP dengan data Bank Penyalur, dan dana sudah diterima namun belum memiliki kartu/aktivasi kartu.
6. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), hal-hal yang terjadi antara lain: prosedur administrasi pengurusan APBD cenderung rumit, sehingga mempengaruhi dalam ketepatan dalam pencairan, dan peserta PPG yang sudah lanjut usia kesulitan dalam pengoperasian TIK.
7. Program Penggunaan Bahasa Indonesia (Bahasa negara) di Ruang Publik, hal-hal yang terjadi antara lain: sosialisasi belum pernah dilakukan, dan sosialisasi sudah dilakukan namun masih ditemukan nama ruang/spanduk/alat informasi lainnya belum sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
8. Program Pembelajaran Berbasis TIK (Rumah Belajar), hal-hal yang terjadi antara lain: belum seluruh guru menguasai TIK, dandi daerah tertentu masih terkendala jaringan, gadget,
9. Program TPG SMP Non PNS, hal-hal yang terjadi antara lain: aplikasi dapodik belum terintegrasi dengan aplikasi lain dibawahnya, kendala jaringan, dan sinkronisasi dengan server pusat.

10. Program TPG Pengawas Sekolah Dikdas, hal-hal yang terjadi antara lain: Rasio jumlah pengawas dengan jumlah guru binaan belum sesuai, kegiatan peningkatan kompetensi pengawas sekolah belum berkesinambungan dan Kompetensi pengawas sekolah masih rendah dan pihak sekolah kurang respon untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan

Adapun langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Inspektorat III dalam tahun 2021, antara lain :

1. Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan Program Guru Penggerak pada tanggal :
 - 11 s.d. 17 Oktober 2021 pada 17 Satker (13/kab/kota di 9 provinsi);
 - 11 s.d. 19 pada P4TK Bidang Bahasa, Jakarta.
2. Melaksanakan pemantauan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tanggal 24 s.d. 30 Oktober 2021 pada 17 Satker (9 PTN dan 8 LL Dikti) di 9 provinsi.
3. Melaksanakan pemantauan terhadap program Banpem Biro Keuangan tanggal 19 s.d. 25 September 2021 pada 18 Satker (17 kab/kota di 8 provinsi dengan sampel sebanyak 137 responden penerima dana bantuan pemerintah.
4. Melaksanakan audit kinerja Program SIPLah pada tanggal :
 - 5 s.d. 11 Mei 2021 pada 3 satker (3 kab/kota) Provinsi Jawa Barat,
 - 18 s.d. 25 Mei 2021 pada 3 satker (3 kab/kota) Jawa Tengah dan Jawa Timur,
 - 1 s.d. 5 Juni 2021 pada Pusdatin, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
5. Pemantauan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tanggal :
 - 15 s.d. 24 Maret 2021 pada Kab. Bandung dan Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat),
 - 31 Maret 2021 (daring) pada Kab. Sorong (Papua Barat), Kab. Kupang (NTT), Kota Palembang (Sumatera Selatan), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kab. Jember (Jawa Timur), Kab.

- Banyumas (Jawa Tengah), Kota Palu (Sulawesi Tengah), Kota Medan (Sumatera Utara), Kota Manado (Sulawesi Utara), Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan).
- 4 s.d. 13 April 2021 pada Kota Bekasi dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat),
 - 25 April s.d. 4 Mei 2021 pada Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kab. Tangerang Provinsi Banten,
 - 1 s.d. 10 Juni 2021 pada Kab. Minahasa Utara (Sulawesi Utara) Kab. Bangli (Bali) dan Kab. Magelang (Jawa Tengah).
6. Melaksanakan Audit Kinerja Program Pendidikan Guru (PPG) tanggal :
- 15 s.d. 24 Maret pada Kota Madiun (Jawa Timur) dan Kota Yogyakarta,
 - 4 s.d. 13 April pada Kab. Cirebon (Jawa Barat), Tegal (Jawa Tengah) dan Kota Pare pare (Sulawesi Selatan),
 - 25 April s.d. 4 Mei pada Kota Banda Aceh (Aceh) dan Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan)
 - 1 s.d. 10 Juni 2021 pada Kota Balikpapan (Kalimantan Timur), Kab. Gianyar (Bali) dan Deli Serdang (Sumatera Utara)
7. Melaksanakan Audit kinerja Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik pada tanggal :
- 15 s.d. 24 Maret 2021 pada Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat),
 - 4 s.d. 13 April 2021 pada Kota Makassar, Kab. Maros, Kab. Gowa) provinsi Sulawesi Selatan
 - 1 s.d. 10 Juni 2021 pada Kab. Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat Provinsi NTB.
8. Melaksanakan Audit kinerja Program Pembelajaran Berbasis TIK pada tanggal:
- 15 s.d. 24 Maret 2021 pada Kota Bandung, Kab. Bandung Barat dan Kab. Bogor) Provinsi Jawa Barat,
 - 4 s.d. 13 April 2021 pada Kota Serang, Kota Tangerang Selatan dan Kab. Tangerang Provinsi Banten,

- 25 April s.d. 4 Mei 2021 pada Kab. Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta provinsi D.I.Yogyakarta.
 - 1 s.d. 10 Juni 2021 pada Kota Kota Padang, Bukittinggi (Sumatera Barat), Kab. Belitung dan Belitung Timur (Babel), dan Kota Samarinda dan Kab. Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur).
9. Melaksanakan Audit kinerja program Tunjangan Profesi Guru Non PNS pada tanggal :
- 15 s.d. 24 Maret 2021 pada Kota Mataram, Kab. Lombok Timur dan Kab. Lombok Tengah.
 - 4 s.d. 13 April 2021 pada Kab. Bandung Barat, Kota Cirebon, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
 - 25 April s.d. 4 Mei 2021 pada Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Gunung Kidul provinsi D.I.Yogyakarta.
 - 1 s.d. 10 Juni 2021 pada Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kota Padang (Sumatera Barat) dan Kota Medan (Sumatera Utara).
10. Melaksanakan audit kinerja program TPG Pengawas Sekolah Dikdas pada t:
- 15 s.d. 24 Maret 2021 pada Kab. Manggarai Barat, Manggarai dan Sumba Provinsi NTT.
 - 4 s.d. 13 April 2021 pada Kota Denpasar, Kab. Badung, dan Kab. Gianyar Provinsi Bali.
 - 25 April s.d. 4 Mei 2021 pada Kab. Indramayu, Karawang, Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat.
 - 1 s.d. 10 Juni 2021 pada Kab. Sleman (D.I.Y), Kota Bandar Lampung (Lampung) dan Kota Tebingtinggi (Sumatera Barat).

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam rencana strategis Itjen Kemendikbud tahun 2020 s.d. 2024 disebutkan bahwa Itjen Kemendikbud mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai Visi dan Misi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Itjen bertugas untuk mengawal pelaksanaan misi Kemendikbud, yaitu: 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi; 2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; 3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Perumusan tujuan Itjen ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian. Kementerian menetapkan lima tujuan yang didasarkan dari sasaran strategis. Dalam hal ini, Itjen berpartisipasi mengampu tujuan kelima, yaitu yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dengan rumusan sebagai berikut:

Tujuan: Peningkatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Tabel 2.1 Target Capaian Inspektorat III dalam Renstra 2021 - 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Baseline	Target			
				2021	2022	2023	2024
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi						

	dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III						
IKK	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III	%	0	35	65	75	80
IKK	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III	%	0	35	65	75	80
IKK	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III	%	22	75	80	85	90
IKK	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	%	100	100	100	100	100

A. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat III pada tahun 2021 berencana akan melaksanakan program penguatan pengawasan Inspektorat III dengan output utama “Layanan Audit Internal dengan enam komponen kegiatan yaitu: (1) Pelaksanaan Audit, (2) Pelaksanaan Reviu, (3) Pelaksanaan Evaluasi; (4) Pelaksanaan Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya, (6) Dukungan Operasional Pengawasan Internal. Program Penguatan Penguatan Penguatan Inspektorat III dengan output utama enam komponen tersebut dituangkan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam PKPT, Inspektorat III didukung oleh anggaran senilai Rp19.114.355.000,- (DIPA Awal)

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	1 Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan Menengah, Vokasi, Pendidikan Khusus dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat III	35%	4.544.680.000
	Pemantauan atas Pelaksanaan Dana Transfer Daerah (TPGPNSD)		
	2 Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan Dasar, Kesetaraan, PAUD dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Inspektorat III	35%	
	Pemantauan atas Pelaksanaan Dana Transfer Daerah (TPGPNSD)		
	3 Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III Pelaksanaan Pengawasan Penerapan WBK dan WBBM	75%	761.060.000
	4 Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah	Skor 3,2	

	kerja Inspektorat III		
	- Pelaksanaan Pengawasan Penerapan SPIP		2.525.780.000
	- Pelaksanaan Audit		8.536.510.000
	- Dukungan Operasional Pengawasan Internal		1.464.240.000
	- Evaluasi Sakip		15.975.000
	- Fasilitasi/Konsultasi		536.400.000
	- Pemantauan Layanan Audit		680.000.000
5	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	100%	
	- Pelaksanaan Reviu		549.710.000
			19.614.355.000

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Inspektur III dengan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat III. Berikut merupakan target capaian dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektorat III dengan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek dalam tahun anggaran 2021.

Tabel 2.3: Target kinerja dalam perjanjian kinerja (awal) Inspektorat III tahun 2021

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)
[SK1] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	1 [IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III	35
	2 [IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III	35
	3 [IKK 1.3] Persentase satker yang berintegrasi di bidang kerja Inspektorat III	75
	4 [IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern (SPIP) eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	3,2
	5 [IKK 1.5] Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	100

Dengan total jumlah anggaran Inspektorat III yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 19.114.355.000,- (DIPA awal)

Pada pertengahan tahun 2021 (2 Juli 2021) terjadi pergantian pimpinan dimana Inspektur III semula dijabat oleh Ir. Muhaswad Dwiyanto, MPd digantikan oleh Drs. Bernard Purba, M.Ak terhitung mulai tanggal 2 Juli 2021, sehingga terjadi perubahan/revisi Perjanjian Kinerja tingkat Eselon II, sebagai berikut :

Tabel 2.4: Target kinerja dalam perjanjian kinerja revisi Inspektorat III tahun 2021

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)
[SK 1] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	1 [IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III	35
	2 [IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III	35
	3 [IKK 1.3] Persentase satker yang berintegrasi di bidang kerja Inspektorat III	75
	4 [IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern (SPIP) eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	3,2
	5 [IKK 1.5] Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	100

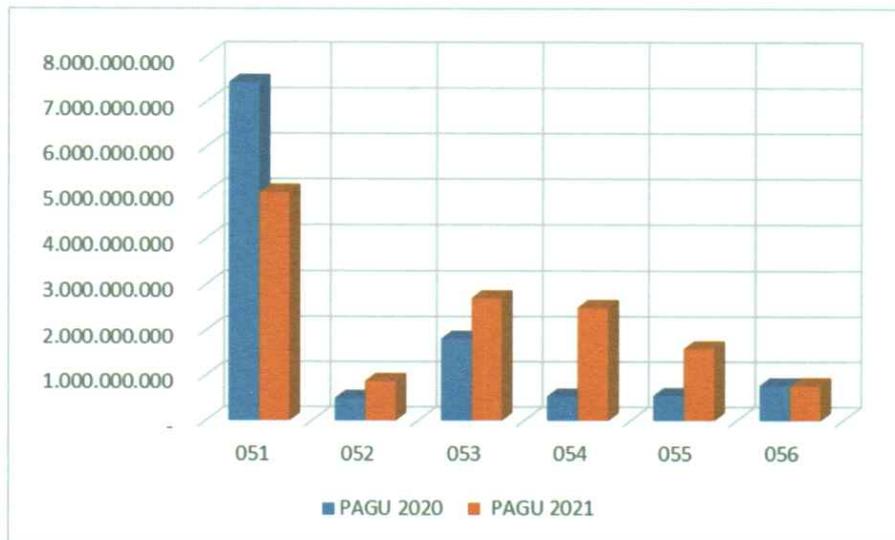
Dengan total jumlah anggaran Inspektorat III yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (revisi) yang sebesar Rp 13.440.273.000,-

Dalam tahun anggaran 2021 Inspektorat III Itjen Kemendikbud mendapat pagu anggaran sebesar Rp 19.114.355.000,- (sesuai DIPA awal) 2021). Pagu tersebut dialokasikan ke per output kegiatan di Inspektorat III Itjen Kemendikbud, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.5 Perbandingan Anggaran per output kegiatan di Inspektorat III tahun 2020 dan 2021

NO	O U P U T	PAGU 2020	PAGU 2021
051	Pelaksanaan Audit	7.424.324.000	5.012.528.000
052	Pelaksanaan Reviu	495.650.000	870.001.000
053	Pelaksanaan Evaluasi	1.810.467.000	2.702.165.000
054	Pelaksanaan Pemantauan	531.900.000	2.493.146.000
055	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	548.729.000	1.587.897.000
056	Dukungan Operasional Pengawasan Internal	772.255.000	774.536.000
	J U M L A H	11.583.325.000	13.440.273.000

Grafik 2.1 Perbandingan Pagu Anggaran TA 2020 dengan 2021



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek selalu berupaya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan uraian ketercapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Inspektorat III Itjen Kemendikbud.

A. Capaian Kinerja Inspektorat III

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2021 yang telah ditetapkan, Inspektorat III Itjen Kemendikbud memiliki 5 (enam) indikator kinerja yang akan dicapai. Berikut merupakan tabel pengukuran kinerja Inspektorat III Itjen Kemendikbud Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.1 Perbandingan Pengukuran Kinerja Inspektorat III Itjen antara 2020 dan 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2020	2021	2020	2021
1	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat III	%	20	35	20	35.29
2	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh kabupaten/kota di wilayah kerja Inspektorat III	%	20	35	42.88	8.17
3	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III	%	70	75	52.94	10

4	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	skor	3.1	3.2	dilaksanakan Januari 2021	3.42
5	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	%	100	100	dilaksanakan Januari 2021	100

B. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK I)

Indikator Kinerja Kegiatan I yaitu persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III, sesuai dengan definisi operasional dimana : Jumlah pemerintah provinsi yang telah mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Dikbud dibagi jumlah seluruh provinsi x 100% di bidang kerja inspektorat III. Diketahui tingkat ketercapaiannya dengan nilai capaian persentasenya sebesar **35,29 %** (sehingga tercapai 100% dari target 35%)

Analisis : IKK ke-1 didukung oleh Komponen Pemantauan atas Pelaksanaan Dana Transfer Daerah (TPG-PNSD) dimana telah dilaksanakan pemantauan transfer Dana Daerah di 12 (dua belas) provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTB dan Kalimantan Timur).

Tabel 3.2 Perbandingan Pengukuran IKK 1 antara 2020 dan 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		2020	2021	2020	2021
Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat III	%	20	35	20	35.29

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja IKK 1 tahun 2020 dan 2021



Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa untuk IKK 1 dalam tahun 2020 maupun 2021 target tercapai, dimana dalam tahun 2020 telah dilakukan pemantauan transfer dana daerah pada 34 provinsi kegiatannya dalam bentuk daring sedangkan untuk tahun 2021 dilakukan pemantauan pada 12 provinsi dilaksanakan sebagian besar dalam bentuk luring/ke daerah.



Gambar 3.1
Audit Kinerja (PPG)
pada Universitas
PGRI Madiun, Jawa
Timur



Gambar 3.2
Prasarana Program
PPG pada
Universitas PGRI
Madiun, Jawa Timur

C. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK 2)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kedua, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III sesuai dengan definisi operasional dimana : Jumlah pemerintah kab/kota yang telah mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Dikbud dibagi jumlah seluruh kab/kota x 100% di bidang kerja inspektorat III. Diketahui tingkat ketercapaiannya dengan nilai capaian persentasenya sebesar **8,17 %**. Hal ini menunjukkan bahwa target 35% tidak tercapai.

Tabel 3.3 Perbandingan Pengukuran IKK 2 antara 2020 dengan 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		2020	2021	2020	2021
Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Inspektorat III	%	20	35	42.88	8.17

Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dan 2021



Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk IKK 2 dalam tahun 2020 maupun 2021 target tidak tercapai, dimana dalam tahun 2020 hanya berhasil melakukan pemantauan transfer dana daerah pada 74 kab/kota, dan pada tahun 2021 pada 42 kab/kota.

Analisis : IKK ke-2 didukung oleh Komponen Pemantauan atas Pelaksanaan Dana Transfer Daerah (TPG-PNSD) dimana telah dilaksanakan pemantauan transfer Dana Daerah di 42 kabupaten/kota pada 12 provinsi.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan capaian persentase tersebut karena pada Triwulan I, II, dan III masih dalam masa pandemi Covid-19 dan seiring terjadi peningkatan level PPKM pada Kab/Kota yang menjadi sasaran tidak dapat dilaksanakan, sehingga target tidak tercapai.

Adapun solusi atas terjadinya kendala tersebut, pada Kab/Kota yang telah tercantum dalam surat tugas, surat tugas direvisi dan petugas/auditor yang bersangkutan dialihkan ke Kab/Kota lain yang sudah ada dalam surat tugas.

Kabupaten/kota yang berhasil dilakukan pemantauan terhadap program Dana Transfer Daerah sebanyak 42 kabupaten/kota yakni Kota : Banda Aceh, Banjarmasin, Madiun, Tangerang Selatan, Depok, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makasar, Pare-pare, Mataram, Kabupaten : Cirebon, Semarang, Banyumas, Tegal, Purwokerto, Bandung Barat, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Cianjur, Bogor, Grobogan, Jember, Jombang, Gianyar, Deli Serdang, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Karawang, Majalengka, Purwakarta, Kuningan, Pemalang, Wonogiri, Pasuruan, Gowa.



Gambar 3.3
Audit Kinerja
(TPG PNSD) di
Kab. Wonogiri,
Jateng



Gambar 3.4
Audit Kinerja
(SIPLah) di Kab.
Jember, Jawa
Timur

D. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Ketiga

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman (survei responden), baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi. Satker yang berintegritas dan dibuktikan dengan memperoleh predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

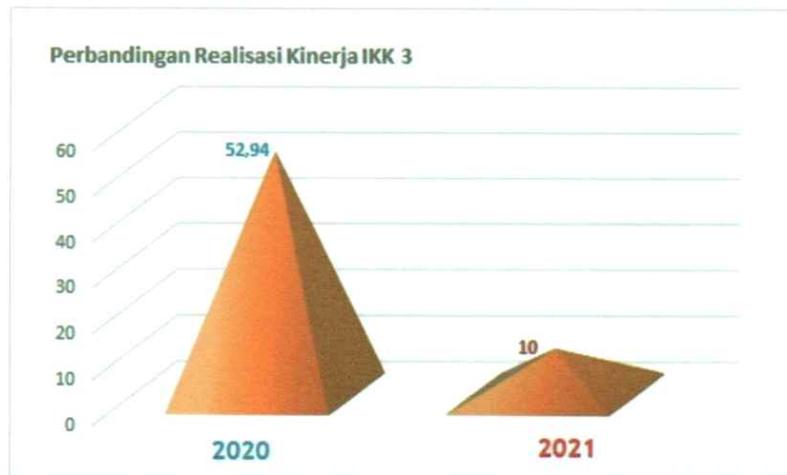
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ketiga, yaitu Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III, mendapat 10,00 %, sehingga tercapai 13,13 % dari target 75%.

Hal ini terjadi antara lain karena kurangnya pemenuhan dari unsur-unsur dari lembar kerja evaluasi yang dilakukan tim evaluasi terhadap satker dimana kumulatif skor yang didapat kurang dari standar minimal dari yang ditetapkan.

Tabel 3.4 Perbandingan Pengukuran IKK 3 antara 2020 dan 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		2020	2021	2020	2021
Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III	%	70	75	52.94	10

Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dan 2021



Analisis : Dari hasil pleno Tim Penilaian Intern (TPI Itjen diketahui bahwa dari 31 Satker, yang lulus sebanyak 11 dan yang tidak lulus 20 satker. Seterusnya sesuai dengan usulan dari Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor : 51097/A.A4/OT.01.03/2021 tanggal 22 Juli 2021, perihal : Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), satker di lingkungan Inspektorat III yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI WBK antara lain:

1. Biro Hukum
2. Biro Organisasi dan Tata Laksana
3. Biro Sumber Daya Manusia
4. Pusat Penguatan Karakter
5. Balai Pengembangan Multimedia Dikbud
6. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
7. PPPPTK Bidang Bahasa
8. PPPPTK Bidang TK dan PLB
9. PPPTK Bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Sedangkan usulan unit kerja berpredikat ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yakni :

- Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Sesuai dengan undangan dari Kemenpan RB tanggal 20 Desember 2021 pukul 08.30 WIB diumumkan bahwa yang lulus ZI WBK/WBBM di lingkungan Kemendikbudristek sebanyak 16 satker. Salah satu diantara satker tersebut yakni Biro SDM Setjen Kemendikbud ristek berada dibawah pengawasan Inspektorat III.

sesuai definisi operasional dimana :

$$SI = \frac{A}{B} \times 100\%$$

SI = Persentase satker yang berintegritas

A= Total satker yang mendapatkan predikat WBK dan WBBM oleh Menpan

di bidang kerja Inspektorat III

B = Total satker yang diusulkan Kemendikbud di bidang kerja Inspektorat III

Sehingga :

$$10,00 \% = \frac{1}{10} \times 100\%$$

Adapun kegiatan yang mendukung IKK ini adalah :

1. Kegiatan Evaluasi ZI WBK

Zona Integritas adalah strategi percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan unit kerja pada instansi pemerintah. Pembangunan ZI ini berfokus pada kepuasan masyarakat sehingga dalam proses penilaiannya tidak hanya dinilai tim penilai internal dan nasional, namun juga memperhatikan hasil dari survei *online* dengan melibatkan masyarakat.

Kementerian PANRB perlu memastikan apakah instansi pemerintah yang diusulkan dalam pembangunan ZI tersebut benar-benar menerapkan budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga layak mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Masyarakat yang merasakan langsung pelayanan dari unit kerja yang diusulkan.

Beberapa kegiatan terkait IKK ini antara lain evaluasi ZI WBK dan supervisi ZI WBK *telah* dilaksanakan dengan menyerap anggaran sejumlah Rp1.429.149.900,- atau sebesar (100 %) dari anggaran sebesar Rp1.429.150.000,-



Gambar 3.5.
Pendampingan
ZI WBK di
BPMPK
Semarang
(Maret 2021)



Gambar 3.6
Pendampingan
ZI WBK di
BPMPK
Semarang
(Maret 2021)



Gambar 3.7
Pendampingan
ZI WBK di Biro
Umum Setjen
(Juni 2021)

E. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Keempat

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) keempat, yaitu Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III mendapat skor 3,42 atau 100% dari target skor 3,2.

SPIP merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Skor kematangan/maturitas SPIP Wilayah Kerja Inspektorat III yaitu Direktorat Jenderal GTK, Badan Bahasa Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Sekretariat Jenderal berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Perka BPKP No. 4 tahun 2016.

Metode perhitungan sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan peningkatan strategi maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP).

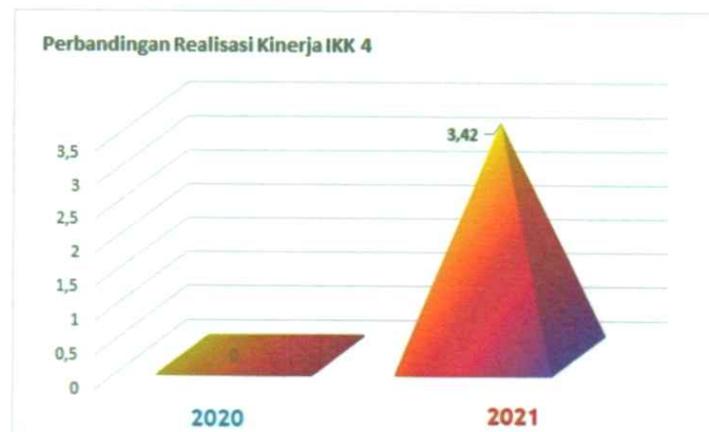
Dengan memperhatikan hasil verifikasi berkas dokumen/data pendukung terkait penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Unit Utama dibidang kerja Inspektorat III, diketahui :

1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapat skor 3,8
2. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan mendapat skor 3,2.
3. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek mendapat skor 3,2.

Tabel 3.4 Perbandingan Pengukuran IKK 4 antara TA 2020 dan 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		2020	2021	2020	2021
Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	skor	3.1	3.2	dilaksanakan Januari 2021	3.42

Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja IKK 4 tahun 2020 dan 2021



Dalam table dan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 capaian IKK 4 masih 0 (nol) disebabkan kegiatan penilaian SPIP belum dilaksanakan dan dilaksanakan pada Januari 2021, sedangkan tahun 2021 kegiatan sudah dilaksanakan dan sudah terlihat hasil capaian masing-masing Eselon I di wilayah kerja Inspektorat III.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan Audit (Komponen 051)

a. Penyusunan Pedoman

Tujuan disusunnya pedoman adalah untuk memberikan arah dalam pelaksanaan di lapangan (satker) agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi atau Inspektur Jenderal, yang hasilnya bermanfaat bagi unit yang dilakukan pengawasan.

Seluruh kegiatan penyusunan pedoman dalam tahun 2021 dilaksanakan secara daring dengan dukungan dana sebesar Rp4.641.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp 4.641.000,-



Gambar 3.8
Penyusunan
Pedoman LAKIP
(zoom meeting)

b. Sosialisasi Pedoman

Tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi pedoman adalah untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan serta memberi ruang kepada para auditor menyamakan persepsi dalam berbagai masalah agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami kendala di lapangan.

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dengan daya serap sebesar Rp14.200.000,- atau (97%) dari anggaran sebesar Rp14.600.000,-



Gambar 3.9
Sosialisasi
Audit PNBP
(zoom meeting)

c. Pelatihan di kantor sendiri (PKS)

Pelatihan Kantor Sendiri pada komponen ini adalah kegiatan transfer pengetahuan atau keterampilan dari pegawai untuk pegawai sendiri. PKS biasanya dilakukan dengan kelompok-kelompok kecil, waktunya pendek, dan dapat dilakukan sesering mungkin. Materi PKS budaya kerja dapat membahas tema-tema kecil tertentu sesuai dengan waktunya, misalnya membahas nilai-nilai dasar budaya kerja tertentu seperti nilai Tanggung Jawab, nilai Integritas, nilai Profesionalisme, atau yang lainnya. Materi PKS juga dapat diarahkan untuk membahas masalah-masalah yang muncul di sekitar kantor. PKS dapat diberikan baik oleh pejabat struktural, fungsional, atau pegawai lain yang dianggap mampu.

Kegiatan PKS/sosialisasi ini telah dilaksanakan dengan anggaran sejumlah Rp 15.000.000,- atau 75 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,-



Gambar 3.10
PKS tentang ZI
WBK (zoom
meeting)

d. Audit Kinerja Program Berkelanjutan

Tujuan dari audit kinerja adalah menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.

Audit kinerja program berkelanjutan telah dilaksanakan dengan dukungan anggaran sejumlah Rp 4.960.885.366,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp 4.962.487.000,-



Gambar 3.11
Audit kinerja
(TPG Non PNS)
di Kab. Bandung
Barat, Jawa Barat
(April 2021)



Gambar 3.12
Audit kinerja
(Pembelajaran
Berbasis TIK) pada
Balai Tekkom
Yogyakarta (Mei
2021)



Gambar 3.13
Audit kinerja (TPG
Was Sekolah) di
Kab. Indramayu,
Jawa Barat (April
2021)

e. Ekspose Internal

Ekspose merupakan kegiatan pembahasan terhadap kasus-kasus yang akan diaudit, dalam proses audit, atau telah diaudit, guna mengantisipasi atau menghindari kelemahan timbul dalam pelaksanaan audit atau rekomendasi yang disampaikan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghindari kesalahan rekomendasi atas suatu temuan, dan upaya koreksi temuan yang dihasilkan sehingga terjadi perbaikan positif atas hasil audit berikutnya

Kegiatan ekspose internal telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.950.000,- atau 100 % dari pagu anggaran Rp 4.950.000,-

f. Kompilasi hasil audit

Kompilasi Hasil Audit merupakan kegiatan menggabungkan hasil audit untuk dapat diterjemahkan lebih jauh sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kegiatan kompilasi telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.846.000,- atau 100% dari pagu anggaran Rp 5.850.000,-

2. Pelaksanaan Evaluasi (Komponen 053)

a. Evaluasi SPIP

Sistem Pengendalian Intern dalam PP 60 Nomor Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Inspektorat III telah melaksanakan penilaian SPIP tingkat eselon I dengan dukungan dana sebesar Rp 11.000.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp 11.000.000,-

b. Evaluasi SAKIP

Kegiatan evaluasi SAKIP telah dilaksanakan dengan dana sebesar Rp 500.000,- atau 50% dari anggaran sebesar Rp 1.000.000,-

c. Evaluasi Manajemen Risiko Satker

Kegiatan evaluasi manajemen risiko telah dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 568.275.666,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp 568.275.666,-



Gambar 3.14
Evaluasi
Manajemen Risiko
pada P4TK IPA
Bandung



Gambar 3.15
Evaluasi
Manajemen Risiko
pada P4TK IPA
Bandung

3. Pelaksanaan Pemantauan (Komponen 054)

a. Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian

Kegiatan pemantauan pelaksanaan program Kementerian telah dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp2.318.581.500,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp2.329.750.000,-



Gambar 3.16
Pemantauan
Program
Banpem Biro
Keuangan di
Kab. Bandung,
Jawa Barat



Gambar 3.17.
Pemantauan
Program
Banpem Biro
Keuangan di
Kab. Batang,
Jawa Tengah



Gambar 3.18
Pemantauan
Program
Banpem Biro
Keuangan di
Kab. Lombok
Timur, NTB



Tim Itjen diterima oleh pihak STIE
AMA Salatiga

Gambar 3.19
Pemantauan
Program KIP Kuliah
di STIE AMA,
Salatiga, Jawa
Tengah

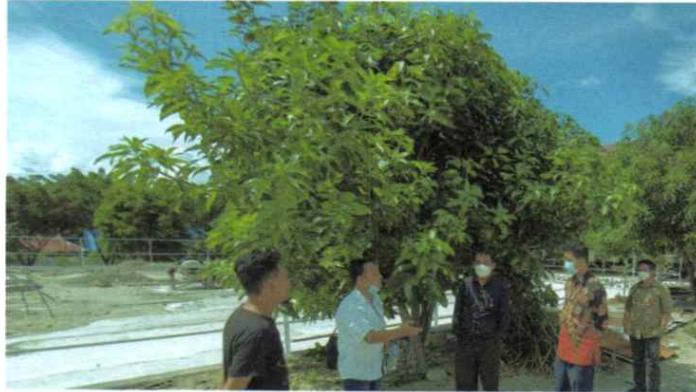


Tim Itjen didampingi LL Dikti
VI melakukan pemantauan
program KIP Kuliah di STIKES
Telogorejo, Semarang

Gambar 3.20
Pemantauan
Program KIP Kuliah
di STIKES
Telogorejo,
Semarang, Jawa
Tengah

b. Pemantauan Pengaduan Masyarakat

Kegiatan pemantauan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp105.203.535,- atau 81 % dari anggaran sebesar Rp129.796.000,-



Gambar 3.21
Pemantauan
rehab pagar
samping Balai
Bahasa Sulteng
(cek fisik)

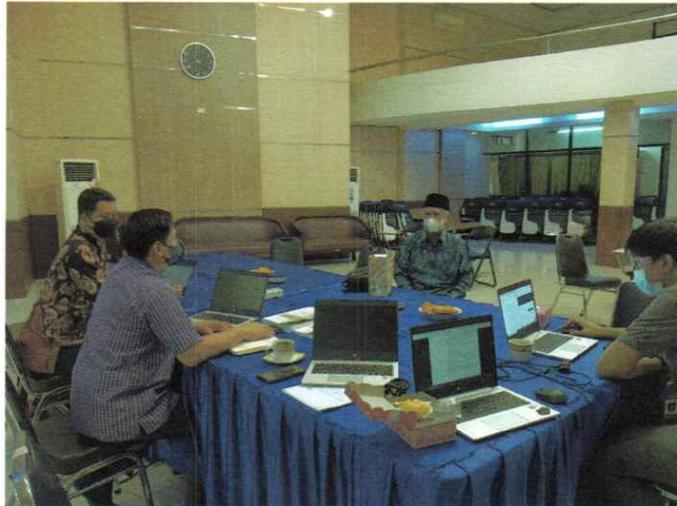


Gambar 3.22
Pemantauan rehab
pagar samping
Balai Bahasa
Sulteng (cek
dokumen)

3. Pelaksanaan Pengawasan Lainnya (komponen 055)

a. Pendampingan Pelaksanaan Program Kementerian

Kegiatan pendampingan pelaksanaan program Kementerian telah dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp799.128.000,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp801.007.000,- sebagai berikut :



Gambar 3.23
Pendampingan
LK di LL Dikti
Wilayah XI
Banjarmasin
(Desember
2021)



Gambar 3.24
Pendampingan
Penyusunan
LAKIP di LL
Dikti Wilayah XI
Banjarmasin
(Desember
2021)

b. Pendampingan Penguatan SPI Satker/UPT

Kegiatan pendampingan pelaksanaan program Kementerian telah dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp786.641.800,- atau 100 % dari anggaran sebesar Rp786.890.000,-



Gambar 3.25
Pendampingan
SPI pada
LP2KS Solo



Gambar 3.26
Pendampingan
SPI pada
LP2KS Solo

4. Dukungan Operasional Pengawasan Internal (komponen 056)

a. Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran

Kegiatan perencanaan dan evaluasi program dan anggaran telah dilaksanakan secara fullboard bertempat di Hotel Luxton, Bandung, Jawa Barat, dengan dukungan anggaran sebesar Rp330.860.000,- atau 96 % dari anggaran sebesar Rp344.660.000,-



Gambar 3.27 Inspektur III memberikan pengarahannya pada kegiatan evaluasi program di Bandung (Desember 2021)



Gambar 3.28 Inspektur Jenderal Kemendikbu distek memberikan pengarahannya via zoom



Gambar 3.29
Para auditor mengikuti kegiatan evaluasi program



Gambar 3.30
Para auditor mengikuti kegiatan evaluasi program



Gambar 3.31
Para auditor mengikuti kegiatan evaluasi program

b. Ketatausahaan Inspektorat III

Kegiatan ketatausahaan Inspektorat III telah dilaksanakan secara fullboard dengan dukungan anggaran sebesar Rp 424.386.000,- atau 99% dari anggaran sebesar Rp 429.876.000,-



Gambar 3.32
Kegiatan
Ketatausahaan
di Hotel Mercure
Alam Sutra,
Serpong, Banten



Gambar 3.33
Kegiatan
Ketatausahaan
di Hotel Santika
Premierre,
Bintaro, Tangsel,
Banten



Gambar 3.34
Kegiatan
Ketatausahaan
(di Hotel Luxton,
Bandung

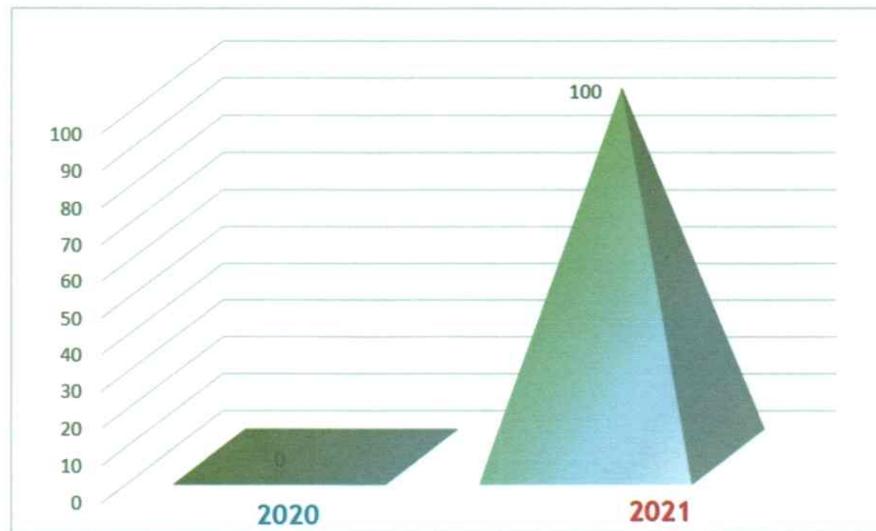
F. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kelima

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kelima yaitu persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III, dimana hasil penilaiannya dilaksanakan dibulan Desember 2021 dengan hasil 100% atau 100% dari target 100%.

Tabel 3.5 Perbandingan Pengukuran IKK 5 antara TA 2020 dan 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
		2020	2021	2020	2021
Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	%	100	100	0	100

Grafik 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja IKK 5 tahun 2020 dan 2021



Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 mendapat nilai 0 disebabkan kegiatan evaluasi tidak dapat dilaksanakan, jadi kegiatan evaluasi dilaksanakan di tahun 2021.

Hasil kegiatan evaluasi LK terhadap tiga Unit Utama yakni Setjen Kemendikbudristek, Ditjen GTK dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, masing-masing mendapatkan nilai sebagai berikut:

1. Setjen Kemendikbud dengan nilai 4,94 (sangat baik)
2. Ditjen GTK, dengan nilai 4,84 (sangat baik)
3. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan nilai 4,91 (sangat baik)

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung IKK ini antara lain :

1. **Reviu Laporan Keuangan**

Reviu LK adalah penelaahan atas penyelenggaraan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LK K/L) Negara atau Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan laporan keuangan kementerian/lembaga telah disajikan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan kementerian/lembag yang berkualitas.

Kegiatan reviu LK telah dilaksanakan dengan anggaran sejumlah Rp45.138.100,- atau (97%) dari alokasi sebesar Rp 179.000.000,-



Gambar 3.35
Reviu LK
Kementerian
Semester I
(secara zoom)

2. Reviu RKAKL

Untuk memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Kegiatan Reviu RKAKL telah dilaksanakan dengan dukungan dana Rp1.500.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp 1.500.000,-

3. Reviu LAKIP

Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau tim yang dibentuk untuk itu. Pereviu akan memberikan Surat Pernyataan Telah Direviu jika Laporan Kinerja telah mendapatkan reviu melalui kertas kerja.

Kegiatan reviu LAKIP telah dilaksanakan dengan anggaran terserap sebesar Rp40.737.200,- atau 100% dari pagu sebesar Rp40.738.000,-

4. Reviu RKBMN

Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh auditor APIP K/L yang kompeten, memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN.

Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk mendorong penyerapan anggaran secara optimal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggaran tahun 2021. TEPRA juga akan membuat integrasi sistem bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan laporan penyerapan anggaran setiap saat.

Kegiatan reviu RKBMN telah dilaksanakan dengan anggaran terserap sebesar Rp 743.850.649,- atau 100% dari pagu sebesar Rp746.532.000,-



Gambar 3.36
Kegiatan
TEPRA di
Hotel Mirah,
Bogor (Sept
2021)

5. Reviu PIPK

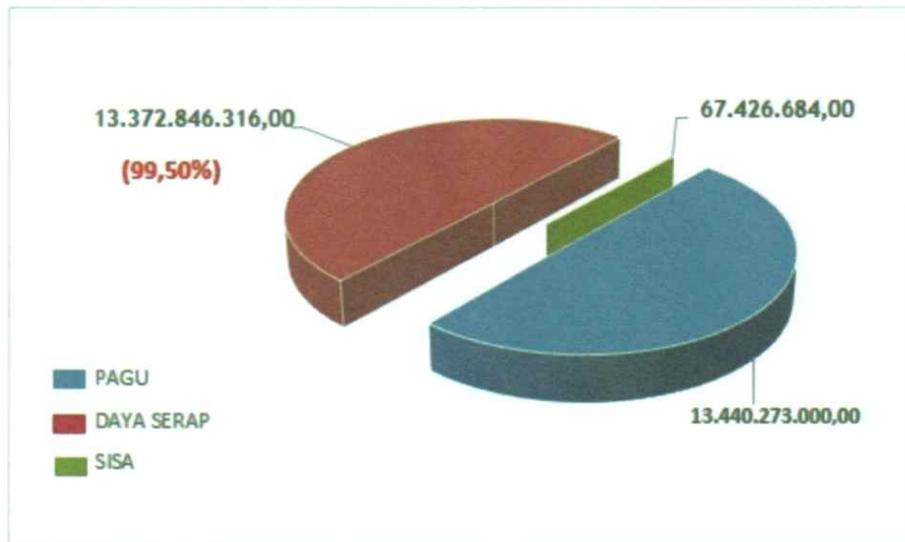
Reviu PIPK adalah penelaahan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang kompeten atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Kegiatan reviu PIPK telah dilaksanakan dengan anggaran terserap sebesar Rp36.091.600,- atau 100% dari pagu sebesar Rp36.092.000,-

H. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2021 Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp19.114.355.000,- (DIPA awal), dimana untuk selanjutnya terdapat beberapa kali revisi anggaran (*refocusing*) sehingga yang terakhir sebesar Rp 13.440.273.000,- dan diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 secara kumulatif telah terserap sebesar Rp 13.372.846.316,- atas sebesar 99,50% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 67.426.684,- (0,5 %).

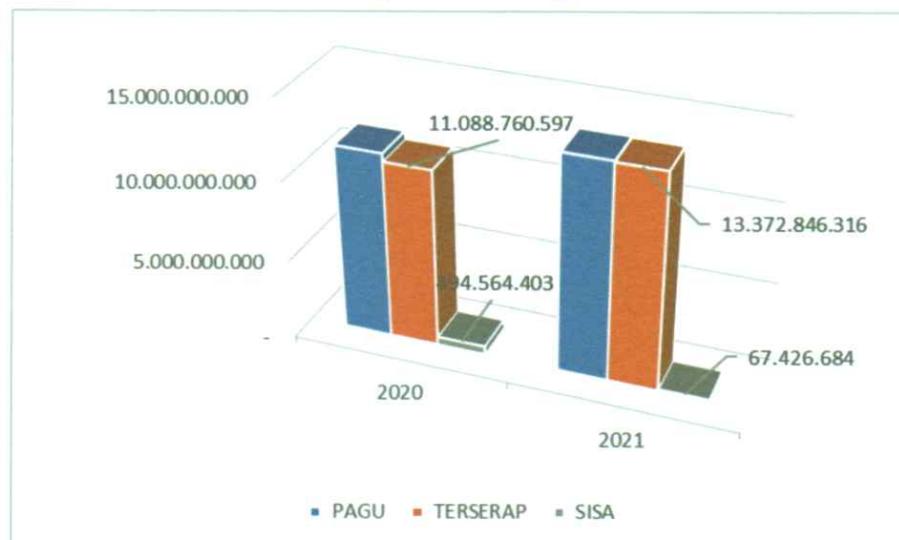
Grafik 3.6 Realisasi Anggaran TA 2021



Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran 2020 dan 2021

TA	PAGU	TERSERAP	SISA
2020	11.583.325.000	11.088.760.597	494.564.403
2021	13.440.273.000	13.372.846.316	67.426.684

Grafik 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran 2020 dan 2021



I. Efisiensi

Dari beberapa sisa anggaran telah dioptimalkan untuk menambah pelaksanaan kegiatan salah satunya audit PNBK pada bulan Nopember 2021.

B. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

- a. Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2021, jadwal kegiatan belum konsisten;
- b. Adanya perubahan kebijakan terhadap pagu anggaran yang dinamis yang mengharuskan revisi anggaran dalam waktu yang singkat;
- c. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan akhir bulan Desember 2021 persoalan yang muncul antara lain terdapat kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan kondisi pandemi Covid 19.

C. Upaya Pemecahan Masalah

- a. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan agar kendala-kendala dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan yang terkait dengan revisi POK, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang dalam penyusunan jadwal kegiatan sehingga tidak terlalu sering melakukan revisi;
- b. Melakukan pengendalian secara ketat terhadap implementasi program agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan jadwal dan menghasilkan output dalam jumlah yang tepat sesuai dengan IKK Inspektorat III;
- c. Pemecahan masalah yang dilakukan ialah dengan melaksanakan kegiatan luring menjadi *daring*.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) Inspektorat III Itjen Kemendikbud Ristek Tahun Anggaran 2021 dengan harapan dapat dijadikan bahan masukan/kajian/telaahan, khususnya mengenai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek dan perbaikan kinerja Tahun 2022.

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Telah Direviu;
2. Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II;
3. Rencana Kerja Tahunan tahun 2021;
4. Realisasi Anggaran dan Kegiatan Inspektorat III Tahun 2021;
5. Lampiran Kegiatan IKK I - IKK V

LAMPIRAN

**Surat Pernyataan
Telah Direviu**



REKAYASAAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
Telepon 021-5737104
Laman www.itjen.kemdikbud.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT III
TAHUN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat III untuk Tahun 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat III. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Januari 2022
Inspektur III

Bernard Purba
NIP 196305221998021001

Catatan Hasil Pendampingan (CHP) Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)

INSPEKTORAT 3 Tahun 2021

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Inspektorat Jenderal	Tgl. Pendampingan: 25 Januari 2021	Disusun oleh: Cucu Nurlaela
	Direviu oleh	Hudi Sulistyono
	Disetujui oleh Auditor Utama	Riem Rayni

Unit Organisasi Eselon II : Inspektorat 3 Itjen Kemendikbudristek

Laporan Kinerja tahun 2021, sudah dibuat masih dalam bentuk draft, sistematika sudah sesuai, isi laporan telah terurai dan tersusun secara lengkap namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki

1. Terkait Kata Pengantar

- a. Penambahan kalimat 'Permenpan-RB No.53 Tahun 2014, bahwa Laporan Kinerja (Lapkin) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.'
- b. Daftar isi agar disesuaikan dari yang sudah dikoreksi
- c. Kata Kemendikbud diganti menjadi kemendikbudristek

2. Terkait BAB I: Pendahuluan

Gambaran Umum

- a. Penambahan kata 'riset dan teknologi'
- b. Penghapusan kata 'Pokok'
- c. Penghapusan 'hal-hal yang terjadi' pada bagian (isu-isu strategis)
- d. Dijabarkan dan dijelaskan mengenai arti PGP, KIP dan seterusnya
- e. Diambil hanya pentingnya saja terkait (permasalahan yang ditemukan), diambil beberapa yang signifikan, diantaranya:
 - 1) No 1 PGP yang diambil poin (b, c, d)
 - 2) No 2 Program KIP kuliah yang diambil poin (a, b, d)
 - 3) No 3 Bantuan Pemerintah Biro Keuangan yang diambil poin (a, b)
 - 4) No 4 Program SIPLAH yang diambil poin (a, b)
 - 5) No 5 pip yang diambil semua poin
 - 6) No 6 PPG yang diambil poin (b, c)
 - 7) No 7 Program penggunaan bahasa Indonesia yang diambil semua poin
 - 8) No 8 Program berbasis tik yang diambil poin (a, b)
 - 9) No 9 ambil semua TPG diambil semua poin
 - 10) No 10 TPG pengawasan sekolah yang diambil poin (a, b, d)
- f. Untuk SDM hanya dijumlah orangnya saja (penghapusan tabel nama), hanya ditampilkan grafik dan strukturnya

3. **Terkait BAB II: Perencanaan Kinerja**

- a. Penghapusan judul BAB 2 pada tulisan 'Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kemendikbud' dibawah judul Perencanaan Kinerja
- b. Matriks 5 tahun 2020-2024 dimasukkan di Perencanaan kinerja bab 2
- c. Tujuan di Inspektorat III di BAB 2 sebelum RKT, dimasukkan perencanaan matrik 5 tahunan renstra (*menampilkan matrik 5 tahunan dan tujuan strategis*)
- d. Perbandingan dengan tahun lalu belum ada, perlu ditambahkan
- e. Grafik 2.2 (anggaran per komponen) dihapus, dibawah tabel 2.2 sebelum bab 3 diberikan keterangan, dijelaskan dalam narasi (revisi pengurangan anggaran)

4. **Terkait BAB III: Akuntabilitas Kinerja**

- a. Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2020, contohnya IKK no 1 dibandingkan dengan IKK No 1, dibandingkan menggunakan tabel secara berdampingan, selanjutnya di bawahnya diuraikan per IKK
- b. 'Triwulan IV' diganti 'realisasi' di tabel 3.2 Capaian Kinerja tahun 2020, tabel 3.2 disesuaikan kolomnya sesuai dengan kolom tabel 3.1
- c. Penambahan persentase no 4 kematangan maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III sebesar 106,8 (tabel 3.1)
- d. Dibawah tabel diberikan dan ditambahkan grafik perbandingan tahun 2020 dengan 2021
- e. Poin kata 'IKK pertama' menjadi IKK 1
- f. Per IKK dibuatkan tabel dan dibuatkan perbandingannya, perbandingan dengan tahun sebelumnya
- g. Untuk kegiatan dihapus, tidak perlu diuraikan lagi kegiatan tersebut
- h. Copy IKK 1 diatas dan bandingkan dengan IKK 1 tahun sebelumnya dan buat analisis serta narasinya, serta buat grafiknya, diagram, gambar yang menarik per IKK
- i. Untuk kegiatan tersebut hanya dimasukkan ke dalam lampiran saja (foto ketika kegiatan dan dituliskan keterangan tema kegiatan IKK tersebut)
- j. Dibawah realisasi anggaran, ditambahkan efisiensi anggaran dalam bentuk grafik (efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi dari beberapa sisa anggaran yang dioptimalisasikan untuk menambah pelaksanaan kegiatan audit PNBPN)

5. **Terkait BAB IV: Penutup**

Permasalahan:

Tambahkan uraian permasalahan yang dihadapi ambil poin 1-2 dari Lakin insp II

Perbaikan

Perbaikan ambil poin 1-2 dari lakin insp II

Kesimpulan

- a. Untuk kesimpulan dimasukkan grafik, perlu dimasukkan juga perihal realisasi keuangan
- b. Penghapusan no 2
- c. No 3 ditambahkan kata 'Pencapaian Kinerja', penghapusan kata 'sampai dengan 31 Desember 2021'

- d. Untuk lampiran ditambahkan 'lampiran kegiatan IKK 1-5', untuk lampiran 'IKK 1-5' dihapus
- e. Capaian keuangan dengan capaian kinerja dibuatkan dalam (grafik)
- f. Copy kesimpulan paragraf 1 di lakin insp 2 ke kesimpulan lakin paragraf 1 insp 3 dengan kalimat 'Pada tahun 2021, Inspektorat III Itjen Kemendikbudristek berhasil melaksanakan beberapa kegiatan utama serta kegiatan pendukung lainnya hingga mencapai daya serap bruto sebesar 99.50% dari anggaran Rp 13.440.273.000.'
- g. Tiap poin kesimpulan poin no 1 dikasih grafik *pie*
- h. No 3 yang sudah diperbaiki menjadi no 2 (dijelaskan dengan grafik batang)

6. Pengisian format Lakin Insp III: (terlampir)

Kepada Inspektur 3 Itjen Kemendikbudristek agar menginstruksikan Tim Penyusun Laporan Kinerja tahun 2021 untuk segera memperbaiki laporan kinerja disesuaikan dengan realisasi capaian sampai dengan akhir tahun berjalan dilengkapi dengan data dan informasi yang valid dan akuntabel.

Auditor Utama



Riem Rayni
NIP196207181988022001

Jakarta, 25 Januari 2021

Tim Reviu



Hudi Sulisty
NIP.196510271990011001



Cucu Nurlaela
NIP 196710131988122001

LAMPIRAN

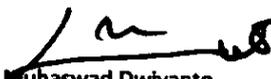
**Rencana Kinerja
Tahunan
(RKT)**

Tahun 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN INSPEKTORAT III TAHUN 2021

Nasabah Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
<p>Tersedianya hasil pengawasan Internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III</p>	<p>1 Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan Menengah, Vokasi, Pendidikan Khusus dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di wilayah kerja Inspektorat III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan atas Pelaksanaan Dana Transfer Daerah (TPGPNSD) 	<p align="center">35%</p>	
	<p>2 Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan Dasar, Kesetaraan, PAUD dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Inspektorat III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan atas Pelaksanaan Dana Transfer Daerah (TPGPNSD) 	<p align="center">35%</p>	<p align="center">4,544,680,000</p>
	<p>3 Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pengawasan Penerapan WBK dan WBBM 	<p align="center">75%</p>	<p align="center">761,060,000</p>
	<p>4 Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pengawasan Penerapan SPIP - Pelaksanaan Audit - Dukungan Operasional Pengawasan Internal - Evaluasi Sakip - Fasilitasi/Konsultasi - Pemantauan Layanan Audit 	<p align="center">Skor 3,2</p>	<p align="center">2,525,780,000 8,536,510,000 1,464,240,000 15,975,000 536,400,000 680,000,000</p>
	<p>5 Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Reviu 	<p align="center">100%</p>	<p align="center">549,710,000</p>

Jakarta, Agustus 2020
Inspektur III,


 Muhaswad Dwiyanto
 NIP 196402021989031004

LAMPIRAN

**Perjanjian Kinerja
Tahun 2021
(Awal)**



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Inspektur III
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhaswad Dwiyanto

Jabatan : Inspektur III

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 09 Februari 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

Inspektur III



Muhaswad Dwiyanto

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III	35
		[IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III	35
		[IKK 1.3] Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III	75
		[IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	3.2
		[IKK 1.5] Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	100

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Rp. 19.114.355.000
		TOTAL	Rp. 19.114.355.000

Jakarta,09 Februari 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

Inspektur III



Muhaswad Dwiyanto

LAMPIRAN

**Perjanjian Kinerja
Tahun 2021
(Revisi)**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Inspektur III
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bernard Purba

Jabatan : Inspektur III

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 07 Desember 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

Inspektur III



Bernard Purba

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III	[IKK 1.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III	35
		[IKK 1.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III	35
		[IKK 1.3] Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III	75
		[IKK 1.4] Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	3.2
		[IKK 1.5] Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	100

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Rp. 13.440.273.000
		TOTAL	Rp. 13.440.273.000

Jakarta, 07 Desember 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Muliana

Inspektur III



Bernard Purba

LAMPIRAN

- Surat Sesjen ttg Pengusulan
Unit Kerja Berpredikat ZI WBK
/WBBM
- Undangan Penganugrahan
Unit Kerja Berpredikat ZI WBK
(KemenPAN RB)

(IKK 3)



RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 51097/A.A4/OT.01.03/2021

22 Juli 2021

Hal : Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
Jakarta

Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami telah melakukan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kami mengusulkan unit kerja sebagai berikut.

A. Usulan Unit Kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK)

1. Biro Hukum
2. Biro Organisasi dan Tata Laksana
3. Biro Sumber Daya Manusia
4. Pusat Penguatan Karakter
5. Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan
6. PPPPTK Bidang Bahasa
7. PPPPTK Bidang Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa
8. PPPPTK Bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
9. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
10. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
11. Direktorat Sekolah Menengah Atas
12. BPPAUD Dikmas Provinsi Sulawesi Selatan
13. BPPAUD Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan
14. BPPAUD Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Barat
15. BPPAUD Dikmas Provinsi Aceh
16. LPMP Provinsi Bangka Belitung
17. LPMP Provinsi Kalimantan Selatan
18. LPMP Provinsi Gorontalo
19. LPMP Provinsi Sumatera Selatan
20. LPMP Provinsi Banten
21. LPMP Provinsi Bengkulu

22. LPMP Provinsi Jambi
23. LPMP Provinsi Kalimantan Tengah
24. LPMP Provinsi Aceh
25. LPMP Provinsi Sumatera Utara
26. LPMP Provinsi Kepulauan Riau
27. LPMP Provinsi Sulawesi Tengah
28. BBPPMPV Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi
29. Politeknik Negeri Bali
30. Politeknik Negeri Jakarta
31. Politeknik Negeri Perkapalan Surabaya
32. Politeknik Negeri Batam
33. Politeknik Negeri Lhokseumawe
34. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
35. Politeknik Negeri Pontianak
36. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
37. Politeknik Manufaktur Bandung
38. Politeknik Negeri Ketapang
39. Politeknik Negeri Padang
40. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
41. Universitas Sumatera Utara (Fakultas Keperawatan)
42. Universitas Andalas (Fakultas Teknik)
43. Universitas Riau (Fakultas Keperawatan)
44. Universitas Indonesia (Fakultas Kesehatan Masyarakat)
45. Universitas Padjadjaran (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
46. Universitas Diponegoro (Fakultas Teknik)
47. Universitas Airlangga (Fakultas Psikologi)
48. Universitas Brawijaya (Fakultas Teknologi Pertanian)
49. Universitas Gajah Mada (Fakultas Teknik)
50. Universitas Tanjungpura (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
51. Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Teknik)
52. Universitas Hasanuddin (Fakultas Ilmu Budaya)
53. Universitas Sam Ratulangi (Fakultas Teknik)
54. Universitas Pendidikan Indonesia (Fakultas Pendidikan IPS)
55. Institut Teknologi Bandung (Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika)
56. Institut Teknologi Sepuluh November (Fakultas Sains dan Analitika Data)
57. Universitas Sriwijaya (Fakultas Hukum)
58. Universitas Negeri Malang (Fakultas IPA)
59. Universitas Negeri Padang (Fakultas Matematika dan IPA)
60. Universitas Negeri Medan (Fakultas Matematika dan IPA)
61. Universitas Trunojoyo Madura (Fakultas Keislaman)
62. Universitas Siliwangi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
63. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
64. Universitas Singaperbangsa Karawang (Fakultas Ekonomi)
65. Universitas Lampung (Fakultas Kedokteran)
66. Universitas Bengkulu (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
67. Universitas Negeri Semarang (Fakultas Teknik)
68. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II
69. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

70. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
71. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
72. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X
73. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
74. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali
75. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah
76. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur
77. Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan
78. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta
79. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat
80. Galeri Nasional Indonesia
81. Balai Konservasi Borobudur
82. Museum Kebangkitan Nasional
83. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
84. Balai Arkeologi Provinsi D.I. Yogyakarta
85. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
86. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

B. Usulan Unit Kerja berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
2. BPPAUD Dikmas Provinsi Jawa Timur
3. LPMP Provinsi Jawa Timur
4. LPMP Provinsi Riau
5. BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri
6. Pusat Asesmen dan Pembelajaran
7. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Tim Penilai Nasional (TPN) dapat melakukan evaluasi atas unit kerja tersebut.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih

Plt. Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im
NIP 196012041986011001

Tembusan:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
TAHUN 2021

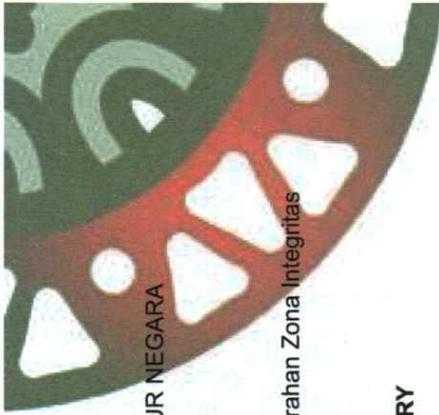
Kepada Yth.

**INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Kepada Yth. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kepada Pimpinan Unit Kerja Penerima Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021

KODE UNIT	UNIT KERJA
B3A01	Biro Sumber Daya Manusia
B3B01	Direktorat SMA
B3B02	LPMP Provinsi Jambi
B3B03	LPMP Banten
B3B04	BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan
B3B05	BP PAUD dan DIKMAS Sulawesi Selatan
B3C01	Fakultas Teknik-Universitas Diponegoro
B3C02	Fakultas Teknik-Universitas Gadjah Mada
B3C03	Fakultas Teknologi Pertanian-Universitas Brawijaya
B3C04	Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Padjadjaran
B3C05	Fakultas Kesehatan Masyarakat-Universitas Indonesia
B3C06	Polliteknik Manufaktur Bandung
B3C07	Polliteknik Negeri Batam
B3D01	Galeri Nasional Indonesia
B3D02	Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta
B3D03	Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Mengundang Saudar/i dalam Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi

MAKING CHANGE, MAKING HISTORY

Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021

Waktu : 08.30 WIB

Venue Online : Zoom Meeting (perhatikan ketentuan penghargaan online)

Dress Code : Pakaian Dinas Harian

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Tjahjjo Kumbogo

INFORMASI DAN KETENTUAN PENGHARGAAN ONLINE

- 
- A. Harap melakukan konfirmasi kehadiran mulai tanggal 18-19 Desember 2021 melalui konfirmasi.menpan.go.id
 - B. Awardee **TIDAK PERLU** datang fisik ke tempat acara di Jakarta
 - C. Acara Penghargaan melalui Zoom Meeting dapat diikuti melalui tautan link <https://tinyurl.com/AnugerahZonaIntegritas2021> (Passcode: ZI2021)
 - D. Awardee **WAJIB** memasuki undangan Zoom Meeting paling lambat 30 menit sebelum acara penghargaan dimulai
 - E. Awardee diharapkan memastikan kondisi jaringan internet dalam keadaan stabil.
 - F. Akun Zoom Meeting Awardee **WAJIB** menggunakan format: (Kode unit kerja agar tidak disebarkan pada sosial media), NO KODE UNIT_NAMA INSTANSI NAMA UNIT KERJA (contoh: A001_KEMENTERIAN KEUANGAN_KPP LHOKSEUMAWE)
 - G. Apabila format nama tidak sesuai, **TIDAK** diperkenankan masuk pada sesi penghargaan.
 - H. Jumlah maksimal akun yang dapat bergabung untuk 1 unit kerja adalah sebanyak 1 akun. Dalam hal ini penggunaan ruang yang sama saat mengikuti acara penghargaan, diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.
 - I. Pada acara penghargaan, Awardee diharapkan untuk menjaga lingkungan sekitar tetap kondusif dan menggunakan fitur **mute microphone** serta selalu **menyalakan video**
 - J. Kelengkapan acara penghargaan dapat diunduh melalui tautan bit.ly/zonaintegritas21

RUNDOWN ACARA

JAM	OFFLINE	ONLINE
07.00-08.00	Registrasi dan <i>coffee morning</i>	Registrasi dan <i>screening</i>
08.00-08.05	Pemanggilan para penerima dan tamu undangan untuk memasuki ruang acara	
08.05-08.30	Tamu undangan non-VVIP memasuki ruang acara	
	Tamu undangan VVIP diarahkan di ruang transit VVIP	
08.30-08.40	Tamu Undangan VVIP memasuki ruang acara	Seluruh peserta menyalakan video
	Penyambutan atas tamu undangan dan penerima penganugerahan	
08.40-08.45	Wakil Presiden RI hadir secara online	
08.45-08.50	Menyanyikan Indonesia Raya	
08.50-08.55	Pembacaan Doa	
08.55-09.00	Opening oleh MC	
09.00-09.05	MC Prolog	
09.05-09.12	Laporan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan Kementerian PANRB	
09.12-09.22	Pengarahan dari Wakil Presiden RI	
	Prolog MC	
09.22-09.27	Video (5 Menit) : Terobosan, Keberhasila dan Hasil nyata beberapa unit kerja WBK/WBBM seerta testimony	
09.27-09.30	Prolog MC	
09.30-09.40	Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
09.40-09.50	Penyerahan Apresiasi Kepada Pemimpin Perubahan	
09.50-10.45	Penyerahan anugerah predikat WBK dan WBBM kepada Unit Kerja simbolis secara offline	
10.15-10.45	Tayangan Penerima Penghargaan ZI WBK WBBM Online	
10.45-10.50	MC Closing	



REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT III TAHUN 2021

**REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2021
INSPEKTORAT III INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD**

NO	URAIAN SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/ DETIL TANPA SUB OUTPUT	KETERANGAN	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT	PETUGAS YANG TERLIBAT	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SALDO
001	2	3	4	5	6	7	8	9
051	Pelaksanaan Audit					5.012.528.000	10.257.885.053	(5.245.357.053)
A	Penyusunan Pedoman					4.641.000	4.641.000	-
	1	Penyusunan Pedoman dan Instrumen Pemantauan	9 s.d. 12 Maret 2021	Daring	56 Orang			
	2	Penyusunan Pedoman dan Instrumen	5 s.d. 21 Mei 2021	Daring	57 Orang			
	3	Penyusunan Pedoman dan Instrumen	28 s.d. 31 Juli 2021	Daring	39 Orang			
	4	Penyempurnaan Pedoman dan Instrumen	16, 18, 20 Agustus 2021	Daring	48 Orang			
B	Sosialisasi Pedoman					14.600.000	14.200.000	400.000
	1	Sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2021	12 Januari 2021	Daring	69 Orang Peserta dan 2 Orang Narasumber			
	2	Sosialisasi Program Kerja Inspektorat III TA 2021	18 Januari 2021	Daring	69 Orang Peserta			
	3	Sosialisasi Reviu PIPK Tingkat Eselon I di lingkungan Kemendikbud	25 Januari 2021	Daring	69 Orang Peserta			
	4	Sosialisasi Revaluasi Aset pada LL Dikti	13 Februari 2021	Daring	69 Orang Peserta			
	5	Sosialisasi Pemantauan Program PIP	30 Maret 2021	Daring	68 Orang Peserta			
	6	Sosialisasi Audit Kinerja Frekuensi II	3 April 2021	Daring	68 Orang Peserta			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7 Sosialisasi Evaluasi Manajemen Risiko	18 s.d. 21 Mei 2021	Daring	68 Orang Peserta			
		8 Sosialisasi Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2021	14 Juni 2021	Daring	68 Orang Peserta			
		9 Sosialisasi Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2021	22 Juni 2021	Daring	68 Orang Peserta			
		10 Sosialisasi TPG PNSD	26 Agustus 2021	Daring	67 Orang Peserta			
		11 Sosialisasi Banpem Biro Keuangan	27 Agustus 2021	Daring	67 Orang Peserta			
		12 Sosialisasi Pemantauan KIP Kuliah	21 Oktober 2021	Daring	67 Orang Peserta			
		13 Sosialisasi Audit PNBPN	4 November 2021	Daring	67 Orang Peserta			
		14 Sosialisasi Pendampingan LK dan LAKIP	3 Desember 2021	Daring	67 Orang Peserta			
	C	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)				20.000.000	15.000.000	5.000.000
		1 PKS Reviu Penilaian Kembali BMN Tahun 2020	13 Januari 2021	Daring	68 Orang Peserta dan 2 Orang Narsum			
		2 PKS Evaluasi ZI WBK	26 Februari 2021	Daring	68 Orang Peserta			
		3 PKS Pedoman Pendampingan Penguatan SPI	15 Juli 2021	Daring	68 Orang Peserta			
		4 PKS New SPIP dan IEPK	26 Juli 2021	Daring	68 Orang Peserta			
		5 PKS Evaluasi SAKIP	2 Agustus 2021	Daring	67 Orang Peserta			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6 PKS Sistem Manajemen Kinerja PNS	3 Agustus 2021	Daring	67 Orang Peserta			
		7 PKS Program Guru Penggerak	12 Agustus 2021	Daring	67 Orang Peserta			
		8 PKS Program KIP Kuliah	13 Agustus 2021	Daring	67 Orang Peserta			
		D Audit Kinerja Program Berkelanjutan				4.962.487.000	10.213.248.053	5.250.761.053
		Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Prog. Pemanfaatan Belajar Berbasis TIK	25 s.d. 27 Januari 2021	Pusdatin	5 Orang			
		Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Pengutamaan Bahasa Negara (Indonesia) di ruang Publik	27 s.d. 29 Januari 2021	Badan Bahasa	5 Orang			
		3 Audit Kinerja 6 Program	15 s.d. 24 Maret 2021	4 Provinsi	61 Orang			
		4 Supervisi Audit Kinerja I	17 s.d. 18 Maret 2021	Bogor	3 Orang			
			19 s.d. 21 Maret 2021	Bandung				
		5 Audit Kinerja 6 Program	4 s.d. 13 April 2021	5 Provinsi	68 Orang			
		6 Supervisi Audit Kinerja II	4 s.d. 6 April 2021	Purwokerto				
			7 s.d. 9 April 2021	Tangsel	3 Orang			
			12 s.d. 13 April 2021	Depok				
		7 Audit Kinerja 6 Program	25 April s.d. 4 Mei 2021	6 Provinsi	70 Orang			
		8 Supervisi Audit Kinerja III	25 s.d. 26 April 2021	Indramayu				
			27 s.d. 30 April 2021	Banten	3 Orang			
			1 s.d. 4 Mei 2021	Cirebon				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9 Audit Kinerja Program SIPLah (19 s.d. 23 April 2021)		Pusdatin	6 Orang			
		10 Audit Kinerja Program SIPLah (5 s.d. 11 Mei 2021)	19 April s.d. 19 Juli 2021	Jabar	9 Orang			
		11 Audit Kinerja Program SIPLah (24 s.d. 28 Mei 2021)		Jateng & Jatim	9 Orang			
		12 Audit Kinerja Program SIPLah (21 s.d. 25 Juni 2021)		Pusdatin	6 Orang			
		13 Audit Kinerja 6 Program	1 s.d. 10 Juni 2021	10 Provinsi	64 Orang			
		14 Supervisi Audit Kinerja IV	3 s.d. 7 Juni 2021	Magelang Sleman	3 Orang			
		15 Audit PNBP	7 s.d. 13 November 2021		64 Orang			
		16 Supervisi Audit PNBP	7 s.d. 13 November 2021		3 Orang			
	F Ekspose Internal					4.950.000	4.950.000	-
		1 Ekspose Hasil Evaluasi Manajemen Risiko	2, 5, 6 Juli 2021	Daring	30 Orang			
		2 Ekspose Hasil Verifikasi Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2020	30 Agustus 2021	Daring	63 Orang			
		3 Ekspose Hasil Evaluasi NSPK TPG PNSD	14 September 2021	Daring	67 Orang			
		4 Ekspose Hasil Pemantauan Banpem (Internal)	27 September 2021	Daring	67 Orang			
		5 Ekspose Hasil Pemantauan Banpem (Eksternal)	1 Oktober 2021	Daring	67 Orang			
		6 Ekspose Hasil Pendampingan Penguatan SPI	19 Oktober 2021	Daring	67 Orang			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ekspose Hasil Pemantauan Pelaksanaan Program Guru Pengerak	22 Oktober 2021	Daring	67 Orang			
		Ekspose Hasil Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian (KIP Kuliah)	2 November 2021	Daring	67 Orang			
		Ekspose Hasil Audit PNB	17 November 2021	Daring	67 Orang			
		Ekspose Hasil Pendampingan LK dan LAKIP	24 Desember 2021	Daring	67 Orang			
	H	Kompilasi Hasil Audit				5.850.000	5.846.000	4.000
		1 Kompilasi Revaluasi Aset pada LLDIKTI	9 s.d. 12 Maret 2021	Daring	6 Orang			
		2 Kompilasi Manajemen Risiko	7 s.d. 9 Juli 2021	Daring	30 Orang			
		3 Kompilasi Audit Kinerja	5 s.d. 9 Agustus 2021	Daring	63 Orang			
		4 Kompilasi Hasil Evaluasi NSPK TPG PNSD	15 s.d. 17 September 2021	Daring	67 Orang			
		5 Kompilasi Hasil Pemantauan Banpem	28 s.d. 30 September 2021	Daring	67 Orang			
		6 Kompilasi Hasil Pemantauan PGP, Pemantauan KIP Kuliah, dan Audit PNB	22 s.d. 26 November 2021	Daring	67 Orang			
		7 Kompilasi Hasil Pendampingan LK dan LAKIP	27 s.d. 31 Desember 2021	Daring	63 Orang			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
052	Pelaksanaan Reviu					870.001.000	867.317.549	2.683.451
	A	Reviu Laporan Keuangan				45.139.000	45.138.100	900
		1 Reviu LK Eselon I	8 s.d. 12 Februari 2021	Setjen, GTK, dan Badan Bahasa	32 Orang			
		2 Reviu LK Kementerian	22 s.d. 26 Februari 2021	DKI	21 Orang			
		3 Reviu LK Kementerian	7 s.d. 10 Mei 2021	DKI	18 Orang			
		4 Reviu LK Eselon I	28 s.d. 31 Juli 2021	Daring	26 Orang			
		5 Reviu LK Kementerian	28 s.d. 31 Juli 2021	DKI	30 Orang			
	B	Reviu RKAKL				1.500.000	1.500.000	-
		1 Reviu Badan Bahasa	28 Jan 2021	Daring	6 Orang			
			28 Mei 2021		2 Orang			
		2 Reviu Sekjen	16 s.d. 19 Maret 2021	Daring	4 Orang			
			27 s.d. 29 Mei 2021		4 Orang			
		3 Reviu GTK	1 s.d. 3 Maret 2021	Daring	4 Orang			
			27 s.d. 29 Mei 2021		4 Orang			
		4 TA Anggaran 2022	26 s.d. 28 Juli 2021	Daring	62 Orang			
		5 Reviu RKA-K/L Sekjen	14-18 Oktober 2021		35 Orang			
		6 Reviu RKA-K/L Badan Bahasa	14-18 Oktober 2021	Daring	16 Orang			
		7 Reviu RKA-K/L GTK	21-23 Oktober 2021		9 Orang			
		8 Reviu Refocusing RKA-K/L GTK	18-20 Oktober 2021	Daring	9 Orang			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9 Reviu Refocusing RKA-K/L Sekjen	25-27 Oktober 2021		9 Orang			
		10 Reviu Refocusing RKA-K/L Badan Bahasa	26-28 Oktober 2021		18 Orang			
C	Reviu LAKIP	1 Reviu LAKIP Eselon I	8 s.d. 12 Februari 2021	Setjen, GTK, dan Badan Bahasa	33 Orang	40.738.000	40.737.200	800
		2 Reviu LAKIP Kementerian	22 s.d. 26 Februari 2021	DKI	21 Orang			
D	Reviu RKBMN	1 Revaluasi Aset	15 s.d. 19 Februari 2021	14 Kantor LL Dikti	61 Orang	746.532.000	743.850.649	2.681.351
		2 Supervisi Revaluasi Aset	15 s.d. 18 Februari 2021	DIY	3 Orang			
		3 Reviu BMN tidak di temukan pada Biro Umum & BMN dan PUSDATIN	15 s.d. 17 April 2021	Banten	4 Orang			
		4 Reviu Penyelesaian Hibah BMN di LLDIKTI Wilayah VIII	18 s.d. 22 Mei 2021	Bali	4 Orang			
		5 TEpra (Fullboard di The Mirah Hotel, Bogor	21 s.d. 23 Juni 2021	Bogor	20 Orang			
		6 TEpra (Fullboard di The Mirah Hotel, Bogor	28 s.d. 30 September 2021	Bogor	20 Orang			
		7 TEpra via Zoom Meeting	29 November s.d. 3 Desember 2021	Daring	9 Orang			
E	Reviu PIPK	1 Reviu PIPK Eselon I	26 s.d. 28 Januari 2021	Setjen, GTK, dan Badan Bahasa	30 Orang	36.092.000	36.091.600	400
		2 Reviu PIPK Kementerian	1 s.d. 5 Februari 2021	Kemdikbud Jakarta	20 Orang			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
053	Pelaksanaan Evaluasi					2.702.165.000	2.701.643.566	521.434
A	Evaluasi Kepatuhan NSPK oleh Pemerintah Daerah					692.733.000	692.718.000	15.000
	1 Evaluasi Kepatuhan Penyaluran TPG PNSD		5 s.d. 11 September 2021	Jabar, Jatim, NTB, Jateng, Sulsel	65 Orang			
	2 Supervisi Evaluasi Kepatuhan Penyaluran TPG PNSD		6 s.d. 11 September 2021	Jabar	2 Orang			
B	Evaluasi SPIP					11.000.000	11.000.000	-
	1 Penilaian SPIP Eselon I		12 s.d. 18 Januari 2021	Setjen, GTK, dan Badan Bahasa	12 Orang			
C	Evaluasi SAKIP					1.000.000	500.000	500.000
	1 Evaluasi Sakip Mandiri		15 s.d. 18 September 2021	Jakarta	22 Orang			
D	Evaluasi ZI-WBK					1.429.150.000	1.429.149.900	100
	1 Evaluasi ZI WBK		1 s.d. 5 Maret 2021	Satker Daerah	67 Orang			
	2 Supervisi Evaluasi ZI WBK		1 s.d. 2 Maret 2021 3 s.d. 5 Maret 2021	Jabar (Bogor & Bandung)	3 Orang			
	3 Evaluasi ZI WBK (lanjutan)		26 s.d. 27 Maret 2021	DIY	2 Orang			
	4 Evaluasi ZI WBK		19 s.d. 23 April 2021	Satker Unit Utama	56 Orang			
	5 Evaluasi ZI WBK		13 s.d. 19 Juni 2021	Satker Unit Utama	86 Orang			
	6 Supervisi Evaluasi ZI WBK		13 s.d. 15 Juni 2021 16 s.d. 17 Juni 2021 18 s.d. 19 Juni 2021		3 Orang			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7 Evaluasi ZI WBK (Unit Utama Eselon II)	21 s.d. 25 Juni 2021	Satker Unit Utama	55 Orang			
E	Evaluasi Manajemen Risiko Satker					568.282.000	568.275.666	6.334
	1	Evaluasi Manajemen Risiko	24 s.d. 28 Mei 2021	Satker Unit Utama	71 Orang			
	2	Supervisi atas Pelaksanaan Evaluasi Manajemen Risiko	24 s.d. 26 Mei 2021 27 s.d. 28 Mei 2021	Jawa Barat	2 Orang			
	3	Evaluasi Manajemen Risiko (Unit Utama Eselon II)	28 Juni s.d. 1 Juli 2021	Jakarta	65 Orang			
	4	Evaluasi Manajemen Risiko (Balai Bahasa Kalsel)	28 Juni s.d. 2 Juli 2021	Kalsel	3 Orang			
054	Pelaksanaan Pemantauan					2.493.146.000	2.457.347.035	35.798.965
A	Pemantauan Pelaksanaan Program Kementerian					2.329.750.000	2.318.581.500	11.168.500
	1	Pemantauan Program PIP Pemantauan atas Pengelolaan Keuangan terkait hasil Pengawasan BPK-RI	31 Maret 2021 18 s.d. 22 Mei 2021	Online Jakarta, Bandung	69 Orang 12 Orang			
	2	Pemantauan Verifikasi Hasil Tindak Lanjut BPK-RI Tahun 2020	1 s.d. 3 September 2021	Jakarta, Banten	17 Orang			
	3	Pemantauan Banpem Biro Keuangan	19 s.d. 25 September 2021	Jabar, Jateng, NTB, Jatim, Banten, Kalbar, Sumsel	65 Orang			
	4	Supervisi Pemantauan Banpem Biro Keuangan	19 s.d. 25 September 2021	Jabar	3 Orang			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pemantauan Asesmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Tahun 2021	27 s.d. 29 September 2021	Jakarta	4 Orang			
		Pemantauan PGP	11 s.d. 17 Oktober 2021		68 Orang			
		Supervisi Pemantauan PGP	11 s.d. 16 Oktober 2021	Jateng dan Jabar	2 Orang			
		Pemantauan Ujian SKD						
		Penerimaan CPNS Formasi 2021	18 s.d. 22 Oktober 2021	DIY	2 Orang			
		Pemantauan KIP Kuliah	24 s.d. 30 Oktober 2021		68 Orang			
		Supervisi Pemantauan KIP Kuliah	25 s.d. 30 Oktober 2021	Jateng dan Jabar	2 Orang			
	B	Pemantauan Dana Transfer Daerah				33.600.000	33.562.000	38.000
		1 Pemantauan Dana Transfer Daerah	15 s.d. 16 April 2021	Online	67 Orang			
	D	Pemantauan Pengaduan Masyarakat				129.796.000	105.203.535	24.592.465
		1 LLDIKTI Wilayah III	15 s.d. 16 Maret 2021	DKI Jakarta	3 Orang			
		2 Pengadaan Renovasi Gedung Asrama PPPPTK TK PLB	4 s.d. 8 Agustus 2021	secara daring di Jakarta	5 Orang			
		3 Rehab Gedung Pancasila, Pusdiklat Pegawai Kemdikbud TA 2021	25 s.d. 27 Agustus 2021	secara daring di Jakarta	5 Orang			
		4 IKPA pada Balai Bahasa Sumatera Utara	16 s.d. 20 November 2021	Sumatera Utara	4 Orang			
		5 Pelaksanaan Rehabilitasi Pagar dan Penataan Halaman Gedung Balai Bahasa Provinsi	15 s.d. 19 Desember 2021	Sulawesi Tengah	4 Orang			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
055	Pelaksanaan Pengawasan Lainnya					1.587.897.000	1.585.769.800	2.127.200
	A	Pendampingan Pelaksanaan Program Kementerian				801.007.000	799.128.000	1.879.000
		1 Pendampingan LK dan LAKIP	5 s.d. 10 Desember 2021		70 Orang			
		2 Supervisi			2 Orang			
	B	Pendampingan Penguatan SPI Satker/UPT				786.890.000	786.641.800	248.200
		1 Satuan Kerja Wilayah Pengawasan Insp. III	18 s.d. 21 Mei 2021	DKI dan Jawa Barat	12 Orang			
		2 Pendampingan Penguatan SPI LLDIKTI dan PPPPTK	3 s.d. 9 Oktober 2021		66 Orang			
		3 Satuan Kerja Wilayah Pengawasan Insp. III	18 s.d. 21 Mei 2021	Jawa Barat	2 Orang			
056	Dukungan Operasional Pengawasan Internal					774.536.000	755.246.000	19.290.000
	A	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran				344.660.000	330.860.000	13.800.000
		1 Fullboard di Hotel Luxton, Bandung	13 s.d. 15 Desember 2021					
	B	Ketatausahaan Inspektorat III				429.876.000	424.386.000	5.490.000
		1 Fullboard di Hotel Grand Mercure Alam Sutra, Tangsel,	21 s.d. 23 April 2021	Hotel Mercure	29 Orang			
		2 Fullboard di Hotel Santika Bintaro, Tangsel, Banten	7 s.d. 9 Juni 2021	Hotel Santika	29 Orang			
		3 Fullboard di Hotel Swissbell Bogor, Jawa Barat	27 s.d. 29 September 2021	Swissbell Hotel Bogor	30 Orang			
		4 Fullboard di Mirah Hotel Bogor, Jawa Barat	8 s.d. 10 November 2021	Mirah Hotel	30 Orang			
		5 Fullboard di Hotel Luxton, Bandung	17 s.d. 19 Desember 2021	Bandung	30 Orang			